

**PEMBATASAN SOSIAL BERKALA BESAR OLEH GUBERNUR
JAWA BARAT**

Analisis Framing pada Portal Berita Tempo.co dan Kompas.com



**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh

RIFQI RIZALNI

13321143

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR OLEH GUBERNUR

JAWA BARAT

Analisis Framing pada Portal Berita Tempo.co dan Kompas.com



Disusun Oleh

RIFQI RIZALNI

13321143

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 20 Januari 2021

Dosen Pembimbing Skripsi,

البعثة الإسلامية
الاستاذة الباندا
Holy Rafika Dhona

Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A.

NIDN 0512048302

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR OLEH GUBERNUR

JAWA BARAT

Analisis Framing pada Portal Berita Tempo.co dan Kompas.com

Disusun Oleh

RIFQI RIZALNI

13321143

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Program
Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 21 Januari 2021

Dewan Penguji:

1. Ketua : Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A.

NIDN. 0512048302



2. Anggota: Narayana Mahendra Prastya, S.Sos, M.A

NIDN. 0520058402



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia




Fuji Hariyanti, S.Sos.,M.I.Kom

NIDN 0529098201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Rifqi Rizalni**

Nomor Mahasiswa : **13321143**

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 19 Januari 2021

Yang menyatakan,



(Rifqi Rizalni 13321143)

MOTTO

Demi masa.

Sungguh, manusia berada dalam kerugian.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. (QS al-Ashr (103): 1-3)



PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Orangtua dan adikku tercinta

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin. Segala puji dan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi Wa Sallam, para sahabat, dan umatnya. Syukur alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini walaupun masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisannya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, dan ridhoNya serta memberikan kemampuan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Ibu Puji Hariyanti., S.Sos, M.I.kom, selaku ketua Prodi Ilmu Komunikasi yang banyak membantu penulis dalam persoalan kuliah di Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr.H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si.,M.Ag., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A., dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak Sarifudin Husni, Ibu Elis Mustika (almh), Ibu O. Sulastri, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis sebagai tanda hormat, bakti dan kasih sayang penulis. Terimakasih tak terhingga untuk orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun tanpa lelah hingga pada akhirnya penulis sampai ditahap ini.
6. Teman-teman yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, Ilmu Komunikasi UII 2013, KKN UII 2016 Unit GK-396, IKASACIS-YK, KPM Galuh Rahayu, PMS-UII, IKPM Jawa Barat dan yang tak penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang tidak disengaja tersebut menyinggung satu dan lain pihak dan semoga ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang berkaitan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2021

Penulis

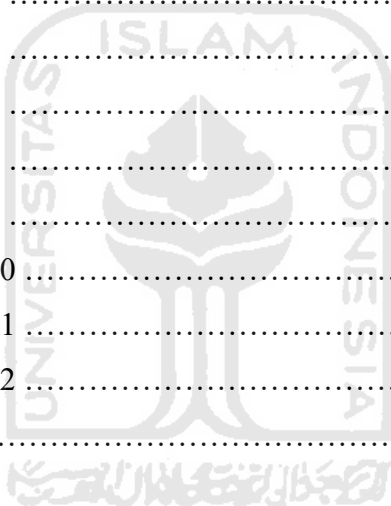
Rifqi Rizalni



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Akademik	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Abstrak	xii
Abstract	xiii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Akademis	4
2. Manfaat Praktis	4
E. Tinjauan Pustaka	4
1. Penelitian Terdahulu	4
2. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	9
1. Paradigma Penelitian	9
2. Pendekatan dan Metode Penelitian	9
3. Objek Penelitian	9
4. Jenis Data	9
5. Tahapan Penelitian	9

Bab II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	14
A. Profil Kompas.com	14
B. Profil Tempo.co	21
Bab III TEMUAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Temuan	25
1. Analisis Berita 1	25
2. Analisis Berita 2	29
3. Analisis Berita 3	31
4. Analisis Berita 4	36
5. Analisis Berita 5	39
6. Analisis Berita 6	42
7. Analisis Berita 7	46
8. Analisis Berita 8	49
9. Analisis Berita 9	52
10. Analisis Berita 10	57
11. Analisis Berita 11	61
12. Analisis Berita 12	66
B. Pembahasan	70
Bab IV KESIMPULAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Keterbatasan Penelitian	73
C. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	11
Tabel 1.2	12
Tabel 3.1 Analisis Berita 1.....	40
Tabel 3.2 Analisis Berita 2.....	41
Tabel 3.3 Analisis Berita 3.....	42
Tabel 3.4 Analisis Berita 4.....	43
Tabel 3.5 Analisis Berita 5.....	44
Tabel 3.6 Analisis Berita 6.....	45
Tabel 3.7 Analisis Berita 7.....	46
Tabel 3.8 Analisis Berita 8.....	47
Tabel 3.9 Analisis Berita 9.....	48
Tabel 3.10 Analisis Berita 10.....	49
Tabel 3.11 Analisis Berita 11.....	50
Tabel 3.12 Analisis Berita 12.....	51
Tabel 3.13 Perbandingan Analisis Berita 1 dan 2	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	13
Gambar 2.1	19
Gambar 2.2	20



ABSTRAK

Rifqi Rizalni. 13321143. Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Gubernur Jawa Barat “(Analisis Framing pada Portal Berita Tempo.co dan Kompas.com)”. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pembingkai berita pembatasan sosial berskala besar oleh Gubernur Jawa Barat periode bulan April 2020 sampai dengan Mei 2020. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Lalu membandingkannya satu sama lain untuk melihat persamaan dan perbedaan pada bingkai yang diangkat.

Kedua media tersebut memiliki ideologi masing-masing dalam pemberitaannya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis framing model Robert N. Entman yang memiliki empat perangkat untuk menentukan pembingkai berita yaitu; *define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation*. Peneliti menggunakan tiga teori, yaitu konstruksi dalam pemberitaan, karakteristik pemberitaan dalam jurnalistik online serta agenda setting media. Terdapat 12 berita yang dianalisis pada penelitian ini.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa, keempat aspek pada teori Robert N. Entman yang penulis gunakan sebagai pedoman penelitian dapat dilaksanakan dengan baik oleh Tempo.co ataupun Kompas.com sesuai dengan kaidahnya. Kemudian dari keseluruhan pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media tersebut tidak ditemukan perbedaan yang signifikan di antara masing-masing media. Baik Tempo.co ataupun Kompas.com memperoleh sumber pemberitaan mengenai PSBB oleh Gubernur Jawa Barat melalui konferensi pers, dan menuliskan hal yang sama meskipun dengan redaksi kalimat yang berbeda-beda. Namun dalam rangka memperoleh informasi lebih lengkap dan mendalam ternyata Tempo.co melakukan wawancara eksklusif dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat dan memuatnya di Majalah Tempo.

Kata Kunci: analisis framing, berita, PSBB, media *online*

ABSTRACT

Rifqi Rizalni. 13321143. Large-scale Social Restrictions by the Governor of West Java "(Framing Analysis on Tempo.co News Portal and Kompas.com)". Undergraduate Thesis. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, Islamic University of Indonesia, 2021.

This research was conducted to describe the large-scale framing of social restrictions by the Governor of West Java for the period April 2020 to May 2020. That the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) with the number of cases and the number of deaths has increased and spread across regions and across countries. and have an impact on political, economic, social, cultural, defense and security aspects, as well as the welfare of the people in Indonesia. In an effort to reduce the spread of COVID-19, the Minister of Health can impose large-scale social restrictions. Then compare them with each other to see similarities and differences in the raised frames.

Both media have their respective ideologies in their reporting. This study uses a constructivism paradigm with a qualitative approach. The analytical method used is the framing analysis model of Robert N. Entman which has four tools to determine the framing of the news, namely; define problems, diagnose causes, make moral judgments, and treatment recommendation. Researchers used three theories, namely construction in reporting, characteristics of news in online journalism and media setting agenda. There were 12 news items analyzed in this study.

The results of this study state that, the four aspects of the theory of Robert N. Entman, which the author uses as a research guide, can be implemented properly by Tempo.co or Kompas.com according to their rules. Then from the overall coverage carried out by the two media, there was no significant difference between each media. Both Tempo.co and Kompas.com obtained news sources about the PSBB by the Governor of West Java through a press conference, and wrote the same thing even though the editors had different sentences. However, in order to obtain more complete and in-depth information, Tempo.co actually conducted an exclusive interview with Ridwan Kamil, the Governor of West Java and published it in Tempo Magazine.

Keywords: framing analysis, news, PSBB, online media

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata karena sudah menyebar dengan cepat di seluruh dunia dan menyebabkan sebuah kepanikan di masyarakat. Hal ini tentu menjadi dampak besar terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat. Seiring dengan menyebarnya wabah Korona Virus 2019 (Covid-19) ke hampir lebih dari 210 negara di dunia hingga 27 April 2020 lebih dari 3.000.000 kasus dan mengakibatkan lebih dari 200.000 orang meninggal dunia dan 878.000 pasien telah sembuh (kompas.com, 2020). Virus ini adalah virus yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 dan tentu masih berlangsung sampai saat ini. WHO telah mengumumkan pada 11 Maret 2020 bahwa virus COVID-19 ini adalah pandemi global yang harus diselesaikan bersama karena sudah meluas di setiap Negara (Sari, 2020)

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta tak terelakkan menjadi negara yang terpapar virus Corona. Pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. berdasarkan data dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Indonesia hingga tanggal 28 April 2020 jumlah warga yang dinyatakan positif virus corona mencapai 9.771 orang, 1.391 sembuh dan 784 meninggal (tirto.id, 2020). Indonesia memiliki tantangan yang besar dengan pandemi covid-19 ini karena memiliki populasi yang sangat besar dan tersebar luas dan secara fakta memiliki jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia. Banyak cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemi ini dimana pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai langkah awal yang responsif untuk meminimalisir lebih luasnya penyebaran virus ini.

Kebijakan pemerintah yang dilakukan diantaranya adalah menerbitkan Permenkes No, 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB, peraturan ini diterbitkan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Pembatasan kegiatan tersebut itu ditujukan bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga telah terkena atau terinfeksi corona. Tujuannya adalah untuk memblokir dan mencegah penyebaran virus corona dalam skala yang lebih besar lagi dari yang sudah tercatat saat ini. (Antara TV Indonesia, 2020).

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 ini juga dilanjutkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi tempat pasien pertama terinfeksi virus covid-19, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi kedua terbanyak setelah DKI Jakarta. Update terkini Provinsi Jawa Barat hari Kamis tanggal 30 April 2020, jumlah pasien terinfeksi positif sebanyak 1.009 orang, 107 pasien sembuh dan 79 pasien meninggal (Pikobar, 2020). Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat termasuk salah satu Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari Presiden secara langsung dengan cepat dan tanggap melakukan percepatan penanganan infeksi virus corona ini. (Anggara, 2020)

Kepala daerah juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PSBB yang didasari oleh data kasus Covid-19 yang terjadi di daerahnya masing-masing. Apabila suatu wilayah telah disetujui oleh Menkes, maka PSBB akan diberlakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Apabila setelah 14 hari tersebut masih terlihat adanya penyebaran, seperti ditemukannya kasus baru, maka masa PSBB akan diperpanjang selama 14 hari kedepan hingga kasus terakhir ditemukan. (Antara TV Indonesia, 2020).

Lamanya durasi PSBB atau karantina wilayah mandiri itu juga bisa memicu permasalahan sosial atau konflik. Hal ini terkait dengan kepercayaan masyarakat dengan pemerintah dalam upaya menyelesaikan pandemi ini. (Dwirahmadi, 2020) Oleh sebab itulah kejelasan informasi tentang keberlakuan PSBB dari Pemerintah Daerah menjadi penting dalam situasi bencana seperti sekarang ini.

Pemberitaan tentang PSBB di Jawa Barat selalu menarik perhatian media Nasional baik cetak ataupun online, dikarenakan pada bulan April – Mei, Jawa Barat mempunyai pasien penderita Covid-19 terbanyak setelah DKI Jakarta. Isu tentang pelaksanaan PSBB menjadi perhatian karena menyangkut pembatasan lalu lintas barang dan orang. Wilayah penyebaran virus corona di Jawa Barat terhitung tinggi. Dari data yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat (Corona Center), kasus paling banyak terjadi paparan COVID-19

berasal dari daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota, mengingat tingkat aktivitas dari wilayah perbatasan ibu kota sangat tinggi berkenaan dengan aktivitas masyarakatnya yang majemuk. (Kautsar, 2020)

Hal tersebut dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurutnya pola penyebaran virus corona di wilayah penyangga sekitar ibu kota mengikuti titik penyebaran utama di Jakarta sehingga besar kemungkinan wilayah sekitar ibu kota terjadi penyebaran virus corona yang cukup tinggi.

Pemberitaan PSBB di Jawa Barat bukan hanya diliput oleh Surat Kabar, tapi juga media online. Media online merupakan bagian dari media baru. Media online memiliki karakteristik yang berbeda dengan media tradisional. Karakteristik yang membedakan media online dan media tradisional terletak pada posisi audiensnya, dalam media online audiens diberi kesempatan untuk ikut berperan dalam proses produksi berita, bahkan bisa diposisikan sejajar dengan jurnalis profesional (contoh: *citizen journalist*).

Selain itu partisipasi audiens secara langsung juga dapat melahirkan komunikasi dua arah antara media dan penggunanya. Karakter lainnya adalah kecepatan media online dalam mengupdate informasi melebihi kecepatan media tradisional.

Dengan adanya teknologi internet, informasi dapat dengan sangat mudah dan cepat didapat, selain itu media online juga memiliki kelebihan dalam multimedia, yaitu dalam media online kita bisa menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk selain teks dan gambar saja, seperti audio, video, maupun infografik.

Perkembangan dari jurnalisme ini semakin hari semakin menggeser media tradisional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai media tradisional yang kini mulai beralih ke versi online mereka. Di Indonesia, hampir semua media tradisional sekarang memiliki versi online mereka masing-masing. Diantaranya KOMPAS.com, TEMPO.CO, Tribunnews.com, REPUBLICA.co.id, MEDIAINDONESIA, PikiranRakyat.com, merdeka.com dan lain-lain.

Objek yang akan diteliti adalah media online Tempo.co dan Kompas.com. Kedua media tersebut sudah lama berkecimpung dalam dunia pemberitaan dari mulai berita cetak hingga berita online yang saat ini sedang populer, dan sama sama memiliki kiprah yang cukup berpengaruh di negeri ini. Tempo.co dan Kompas.com juga merupakan media online yang

dibuat oleh perusahaan-perusahaan pers besar di Indonesia. Selain itu berdasarkan Ranking website/situs berita terpopuler yang paling banyak diakses di Indonesia menurut pemeringkatan alexa.com (diakses per 23 Juni 2020) posisi Kompas.com berada di ranking 4 sedangkan posisi Tempo.co berada di ranking 17.

B. Rumusan Masalah Penelitian

“Bagaimana framing pemberitaan mengenai PSBB oleh gubernur Jawa Barat”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah peneliti ingin melihat bagaimana framing pemberitaan mengenai PSBB oleh gubernur Jawa Barat yang diliput oleh media online Kompas.com dan Tempo.co periode April hingga Mei 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kontribusi pada, khususnya ilmu komunikasi yang khususnya berkaitan dengan analisis isi, khususnya terhadap media online. Bagi pihak diluar ilmu komunikasi, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk dapat memahami pesan atau berita yang ingin disampaikan oleh media online seperti Kompas.com dan Tempo.co.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana memberitakan sebuah peristiwa.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan pada media dalam memberitakan suatu peristiwa

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Kheyene Molekandella Boer, Mutia Rahmi Pratiwi dan Nalal Muna (2020) melakukan *Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemberitaan mengenai Gugus Tugas penanganan Covid-19 di ketiga media online edisi 20-23 Maret 2020. Empat tahap Framing Entman mencakup: *Define Problem*, *Diagnose Cause*, *Make moral judgment* dan *Treatment recommendation*. Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Define Problem* dalam pemberitaan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menggandeng para *influencer* dinilai bukan pilihan yang tepat, *Diagnose cause* ditunjukkan dalam bentuk sikap acuh para generasi milenial dalam menanggapi pandemi Covid-19, *Make moral judgment* dalam bentuk penegasan bahwa para *influencer* tidak dibayar dalam program ini sebagai bentuk kontribusi mereka kepada negara, dan *treatment recommendation* yang ditawarkan adalah pemerintah membekali *influencer* pemahaman yang kuat terkait covid-19 sebelum menjadi mediator penyampai pesan bagi milenial. Media online merupakan ruang publik yang dianggap penting sebagai rujukan dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat, sehingga pemberitaannya diharapkan bisa objektif dan mendidik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rika Oktaviani (2020) yang melakukan *Analisis Framing Pemberitaan Penularan Covid-19 Di Media Online Net.Z Edisi 03-23 April 2020*. Penelitian ini membahas analisis framing pemberitaan penularan Covid-19 di media online NET.Z edisi 03-23 April 2020. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat Bagaimana Analisis Framing pada Pemberitaan Penularan Covid-19 Di Media Online NET.Z Edisi 03-23 April 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana NET.Z mengonstruksi, membangun, memproduksi, dan menyuguhkan pemberitaan-pemberitaan terkait isu penularan Covid-19. Pada penelitian ini, penulis memilih lima berita yang dianalisis menggunakan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki untuk melihat bagaimana bingkai berita penularan Covid-19 yang dibentuk oleh NET.Z, analisis dilakukan dengan keempat strukturnya yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NET.Z

membangkitkan isu mengenai penularan Covid-19 ini sebagai penyakit yang menular dengan cepat. Selain itu dalam kelima berita yang telah penulis analisis, NET.Z juga cenderung menonjolkan suatu peristiwa dengan menggunakan leksikon yang buruk, diantaranya ialah penggunaan kata petaka, tembus, bertambah, dan melonjak yang terdapat dalam headline berita.

Ruri Handariastuti, Zainal Abidin Achmad dan Airlangga Bramayudha (2020) kemudian melakukan penelitian *Analisis Framing Berita Pemberhentian PSBB Surabaya Raya Di Media Online Kompas.Com Dan Suarasurabaya.Net*. Artikel ini membahas tentang Analisis Framing Berita Pemberhentian PSBB Surabaya Raya di Media Online Kompas.com dan Suarasurabaya.net Edisi 8-9 Juni 2020. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktif dan representasi media dengan menggunakan metode analisis Framing Pan dan Kosicki dengan asumsi bahwa setiap berita memiliki frame yang berfungsi sebagai pusat gagasan organisasi. Kompas.com dan suarasurabaya.net punya pandangan dalam mengemas berita tersebut. Kompas.com ialah media online Nasional, sedangkan suarasurabaya.net merupakan media online lokal yang sangat banyak diminati di Surabaya terutama untuk media Radionnya. Dari hasil penelitian ini diketahui sebagian berita yang digunakan memiliki kekurangan dan suarasurabaya.net lebih menkonstruksi sosok Gubernur Jawa Timur.

2. Kerangka Teori

Definisi jurnalisme online

Dalam KBBI jurnalisme didefinisikan sebagai pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam surat kabar dan sebagainya; kewartawanan. Sementara, jurnalistik diartikan yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran. Jurnalistik merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *journalistiek*.

Dalam bahasa Inggris *journalism*, kedua kata yang telah disebutkan tersebut memiliki kata dasar *journal*. *Journal* sebenarnya merupakan kata terjemahan dari

bahasa latin *diurnal* yang memiliki definisi harian atau setiap hari. Effendy menyimpulkan bahwa jurnalistik merupakan teknik memproses berita mulai dari mendapatkan bahan berita hingga akhirnya berita tersebut disajikan kepada masyarakat. (Poerwadarminta, 2003, hal 61)

Jurnalisme online disebut sebagai bentuk baru dari jurnalistik karena di dalamnya menerapkan sebuah fitur dan beberapa ciri yang berbeda dari jurnalisme konvensional. Terdapat fitur yang tampaknya melekat pada jurnalisme online yaitu teknologi, dimana di dalamnya terdapat penawaran untuk dapat mengakses dan menyebarkan berita tanpa batasan. Santana menyebutkan jurnalisme online ini juga sering disebut sebagai '*contextualized journalism*' karena di dalamnya mengintegrasikan tiga fitur komunikasi yaitu multimedia, hipertekstual dan interaktif (Juditha, 2013, hal. 146-147)

Menurut ASM Romli (2014), definisi Jurnalistik Online adalah :

- a. Jurnalistik yang dipraktikkan melalui media internet.
- b. Pengumpulan fakta, cerita, dan laporan yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet.
- c. Jurnalistik Online adalah proses pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita secara online di internet.

Karakteristik Jurnalistik Online

- a. ***Unlimited Space***. Memungkinkan halaman (page) tak terbatas. Ruang bukan masalah. Artikel dan berita bisa sepanjang dan selengkap mungkin, tanpa batas.
- b. ***Audience Control***. Memungkinkan audiens (reader, user, visitor) lebih leluasa memilih berita/informasi.
- c. ***Nonlienarity***. Tiap berita berdiri sendiri sehingga audiens tidak harus membaca secara berurutan.
- d. ***Storage and retrieval***. Memungkinkan berita “abadi”, tersimpan (tersimpan) dan bisa diakses kembali dengan mudah kapan dan di mana saja.
- e. ***Immediacy***. Menjadikan informasi bisa disampaikan secara sangat cepat dan langsung.

- f. **Multimedia Capability.** Memungkinkan sajian berita berupa teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya sekaligus.
- g. **Interactivity.** Memungkinkan interaksi langsung antara redaksi (wartawan) dengan audiens, seperti melalui kolom komentar dan social media sharing. (James C.Foust dalam Romli, 2014)

3. Berita

Berita merupakan cerita yang bermakna yang terdiri dari berbagai elemen dari bahasa. Serta harus dipahami kalau peristiwa adalah suatu realitas. Dan berita merupakan konstruksi dari realitas itu sendiri. Ketika terjadi sebuah peliputan, pemotretan dan syuting, saat itu telah berlangsung suatu konstruksi. Berita memberikan konsep terhadap suatu realitas, karenanya berita melihat realitas sebagai hasil konstruksi manusia. Berita yang ada di media massa merupakan suatu cara untuk menciptakan realitas yang diinginkan mengenai peristiwa. Dengan kata lain berita yang ada di media massa, bukan sekedar menyampaikan tetapi menciptakan makna. (Eriyanto, 2012)

4. Framing dalam Pemberitaan

Mengenai gagasan *framing*, pertama kali dikemukakan oleh Batterson tahun 1995. (Sobur, 2001). Mulanya, *Frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisasikan pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengepresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974, yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*Strips of behaviour*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.(Sobur, 2001)

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal.(Eriyanto, 2012)

Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (kutipan, sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan. *Frame* berhubungan dengan makna.

Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks . (Sobur, 2001)

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dimana paradigma ini memandang realitas sosial bukanlah merupakan realitas yang sebenarnya (natural). Hal ini dikatakan juga oleh Eriyanto (2009: 37), bahwa realitas sosial yang ada merupakan bentukan atau hasil konstruksi realitas yang dibentuk media.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *Deskriptif Kualitatif* dengan maksud untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa yang terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini penelitian tentang framing pemberitaan mengenai PSBB oleh gubernur Jawa Barat yang diliput oleh media online Kompas.com dan Tempo.co periode April hingga Mei 2020.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah media online Kompas.com dan Tempo.co. Kedua media tersebut sudah lama berkecimpung dalam dunia pemberitaan dari mulai berita cetak hingga berita online yang saat ini sedang populer, dan sama sama memiliki kiprah yang cukup besar di Indonesia. Dan peneliti ingin menganalisa bagaimana framing pemberitaan mengenai PSBB oleh gubernur Jawa Barat yang diliput oleh media online Kompas.com dan Tempo.co periode April hingga Mei 2020.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Dalam pengumpulan data primer, penulis mengumpulkan data berita-berita dari Kompas.com dan Tempo.co periode April hingga Mei 2020. Pencarian pemberitaan mengenai PSBB oleh gubernur Jawa Barat menggunakan fitur *search*

dari kedua media tersebut. Kata kunci yang digunakan adalah “PSBB Jawa Barat”. Penulis kemudian memilih periode yang akan diambil untuk diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. (Soegiyono, 2009)

5. Tahapan Penelitian

- a. Peneliti mencari berita yang sesuai dengan pemberitaan mengenai PSBB oleh gubernur Jawa Barat yang diliput oleh media online Kompas.com dan Tempo.co periode April hingga Mei 2020
- b. Peneliti memilah berita yang sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan di judul penelitian di atas.
- c. Memaparkan yang terlibat dan yang terkena dampak atas kasus tersebut.
- d. Menganalisis berita “PSBB oleh gubernur Jawa Barat” dari Kompas.com
- e. Menganalisis berita “PSBB oleh gubernur Jawa Barat” dari Tempo.co
- f. Poin penting dari berita “PSBB oleh gubernur Jawa Barat”.
- g. Penulis mengambil sampel berita yang informasinya berasal dari Gubernur Jawa Barat dan dimuat di Kompas.com dan Tempo.co

6. Model Framing Robert N. Entman

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak, pada Robert N. Entman (Framing: *Toward Clarification of A Fractured Paradigm*, 53) dalam Eriyanto (2012:221). Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh

media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana-penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian grafis yang mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa ke mana berita tersebut. (Eriyanto, 2012:221)

Tabel. 1.1 Kerangka Framing Entman

Seleksi isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (<i>included</i>), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (<i>excluded</i>). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan aspek tertentu dari isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Dalam konsep Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Wartawan memutuskan apa yang akan ia beritakan, apa yang diliput dan apa yang harus dibuang, apa yang ditonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak. (Eriyanto, 2012)

Tabel. 1.2 Elemen Framing Entman

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk meligitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

(Eriyanto, 2012: 222-224)

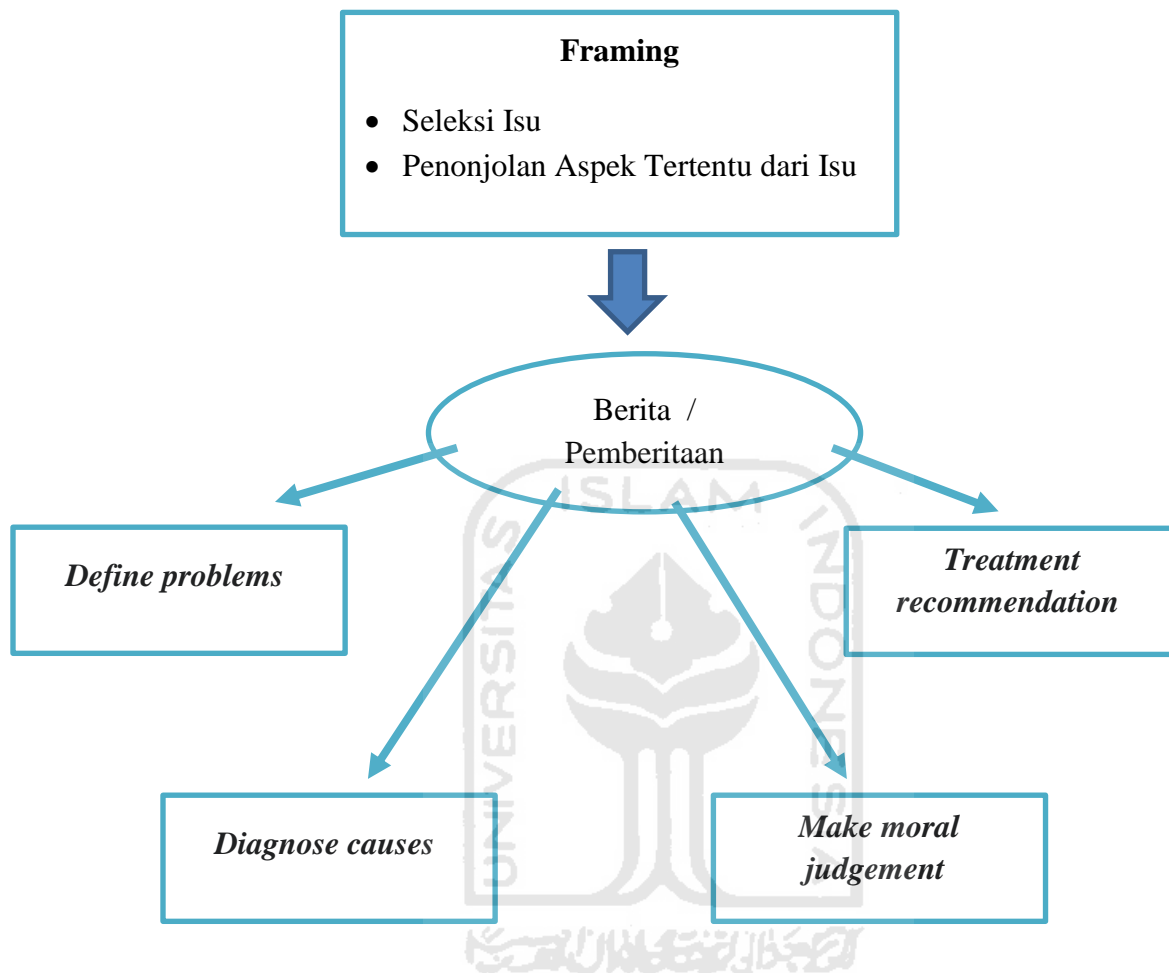
Frame berita timbul dalam dua level. *Pertama*, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. *Kedua*, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. Frame berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita. (Eriyanto, 2012)

Define problems adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing, yang merupakan *master frame* paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan, ketika ada masalah atau peristiwa.

Diagnose causes merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor utama suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*).

Make moral judgement adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Treatment recommendation elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.



Gambar 1.1 Kerangka Framing Robert N. Entman

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kompas.com (kompas.com , 2019)

1. Sejarah Kompas.com

Kompas.com adalah salah satu pionir media online di Indonesia ketika pertama kali hadir di Internet pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. Mulanya, Kompas Online atau KOL yang diakses dengan alamat kompas.co.id hanya menampilkan replika dari berita-berita harian Kompas yang terbit hari itu. Tujuannya adalah memberikan layanan kepada para pembaca harian Kompas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Dengan hadirnya Kompas Online, para pembaca harian Kompas terutama di Indonesia bagian timur dan di luar negeri dapat menikmati harian Kompas hari itu juga, tidak perlu menunggu beberapa hari seperti biasanya.

Selanjutnya, demi memberikan layanan yang maksimal, di awal tahun 1996 alamat Kompas Online berubah menjadi www.kompas.com. Dengan alamat baru, Kompas Online menjadi semakin populer buat para pembaca setia harian Kompas di luar negeri. Melihat potensi dunia digital yang besar, Kompas Online kemudian dikembangkan menjadi sebuah unit bisnis tersendiri di bawah bendera PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 1998. Sejak saat itu, Kompas Online lebih dikenal dengan sebutan KCM. Di era ini, para pengunjung KCM tidak lagi hanya mendapatkan replika harian Kompas, tapi juga mendapatkan update perkembangan berita-berita terbaru yang terjadi sepanjang hari.

Pengunjung KCM meningkat pesat seiring dengan tumbuhnya pengguna Internet di Indonesia. Mengakses informasi dari Internet kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita sehari-hari. Dunia digital pun terus berubah dari waktu ke waktu. KCM pun berbenah diri. Pada 29 Mei 2008, portal berita ini me-*rebranding* dirinya menjadi Kompas.com, merujuk kembali pada *brand* Kompas yang selama ini dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberi makna. Kanal-kanal berita ditambah. Produktivitas sajian berita ditingkatkan demi memberikan sajian informasi

yang update dan aktual kepada para pembaca. *Rebranding* Kompas.com ingin menegaskan bahwa portal berita ini ingin hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas kebenarannya.

2. Metodologi Verifikasi

Dengan *tagline* Jernih Melihat Dunia, Kompas.com ingin memosisikan diri sebagai media yang selalu menyajikan informasi dalam perspektif yang obyektif, utuh, independen, tidak bias oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Karena itu, Kompas.com tidak hanya menyajikan informasi terkini dalam bentuk berita *hardnews* yang *update* mengikuti *nature*-nya media online, tapi juga berita utuh dalam berbagai perspektif untuk menjelaskan duduknya perkara sebuah persoalan yang kerap simpang siur.

Reportase utuh disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari *hardnews*, *softnews/feature*, *wrap-up* berbagai isu yang disajikan tiap pagi, liputan khusus yang memberikan kelengkapan update informasi tiap saat, hingga liputan mendalam berupa *long-form*. Laporan mendalam atau *indepth* disajikan dalam bentuk multimedia *story telling* yang dikenal sebagai Visual Interaktif Kompas (VIK).

Media online dituntut menyajikan berita secara cepat. Namun bagi Kompas.com kecepatan bukan segalanya. "*Get it first, but first get it right*" adalah adagium jurnalistik lama yang masih dipegang teguh. Di era digital dan media sosial saat ini, ketika kebenaran sulit ditemukan di antara lautan informasi, menemukan kebenaran menjadi sangat relevan. Kompas.com tidak ingin menjadi bagian dari kegaduhan (*noise*) di media sosial. Kompas.com berupaya memberi jawaban atas kegaduhan-kegaduhan itu (*voice*).

Selain memiliki ratusan reporter di berbagai pelosok Indonesia yang siap membuat karya-karya jurnalistik berdasarkan informasi di lapangan, Kompas.com juga memiliki satu divisi media sosial, yang selalu memonitor percakapan media sosial secara *real-time*. Tim media sosial memberikan hasil *social media listening* tersebut kepada tim redaksi yang kemudian dipakai untuk bahan mentah untuk diolah di dapur *Newsroom*.

Redaksi tak langsung menelan mentah-mentah apa yang dibicarakan di media sosial. Tim Kompas.com terbiasa bekerja untuk memfilter informasi, baik informasi di lapangan maupun informasi di media sosial, apakah fakta ataukah hoaks. Ingin dipastikan, Kompas.com bisa menjadi referensi pembaca untuk memvalidasi apakah sebuah informasi itu hoaks atau bukan. Demi mendapatkan kebenaran jurnalistik itu perlu disiplin melakukan verifikasi atas fakta dan data yang didapatkan di lapangan atau di media sosial. Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi: observasi lapangan, narasumber, dan data. Observasi lapangan adalah prioritas pertama yang dilakukan untuk mendapatkan fakta orisinal. Semua informasi awal yang didapatkan, termasuk informasi dari media sosial, di cek langsung ke lapangan.

Berikutnya, dilakukan pendalaman fakta tersebut dengan mencari narasumber yang dapat dipercaya. Setiap wartawan Kompas.com memastikan narasumber yang dikutip adalah sumber pertama yang berada saat peristiwa terjadi. Informasi dari sumber kedua dan ketiga diperlakukan dengan sikap skeptis. Selanjutnya, semua informasi dari narasumber wajib dicek dan cek ulang ke pihak-pihak yang terkait dengan topik yang dibahas. Kredibilitas narasumber menyangkut latar belakang, rekam jejak, dan kredibilitasnya juga menjadi perhatian utama demi mendapatkan pandangan yang obyektif dari mereka.

Untuk melindungi privasi, Kompas.com tidak memublikasikan atau memberi link informasi pribadi narasumber, seperti nomor telepon dan alamat email. Pembaca yang membutuhkan, bisa meminta kepada redaksi Kompas.com dan akan diberikan atas persetujuan narasumber terlebih dahulu. Untuk lembaga atau wakil lembaga, Kompas.com menyertakan sumber resmi lembaga sebagai pemberi informasi (misal berupa link siaran pers atau link ke sebuah data) di dalam tubuh berita sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

Untuk data, Kompas.com memastikan data yang diperoleh berasal dari sumber resmi yang kredibel, apakah lembaga pemerintah atau lembaga internasional. Data yang ditampilkan menyebutkan sumber data maupun tautan (link) sumber tersebut.

Kompas.com juga didukung lembaga riset mandiri yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang selama puluhan tahun teruji dengan data yang obyektif, valid, dan independen.

3. *Fact-checker* Kompas.com

Sejak berita-berita hoaks marak, Kompas.com secara reguler menjadi bagian dari media massa yang berusaha memverifikasi dan memvalidasi setiap berita hoaks atau fakta yang beredar di masyarakat. Kerja jurnalistik Kompas.com secara otomatis menempatkan diri sebagai *fact-checker* dari setiap simpang-siur berita yang ada.

Namun, upaya secara reguler untuk mulai mengikuti berbagai isu yang bergulir di masyarakat maupun di media sosial, dilakukan sejak tahun 2016, dengan pembuatan Topik Pilihan di Kompas.com yaitu "Hoaks atau Fakta?"

Dalam upaya memperluas mitra untuk verifikasi dan validasi setiap isu, Kompas.com bekerja sama dengan TurnBackHoax.id (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia - MAFINDO). Melalui Kompas.com, pembaca juga bisa melaporkan jika menemukan keraguan apakah berita yang mereka terima hoaks atau bukan, melalui link Laporkan Hoaks yang terhubung ke TurnBackHoax.id.

Untuk beberapa berita yang berhasil diverifikasikan Kompas.com, redaksi memberi kesimpulan dengan 3 hal, yaitu Fakta (jika berita tersebut benar), Hoaks (jika berita tersebut tidak benar), dan Sesat (jika berita tersebut mengandung kebenaran namun disimpangkan oleh penyebar berita).

Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN = *International Fact - Checking Network.*). IFCN resmi memasukkan Kompas.com sebagai jejaring lembaga penguji internasional. Pencapaian ini kian memacu Kompas.com untuk terus memberikan sajian berita akurat, lengkap dan tepercaya.

4. Pendanaan Kompas.com

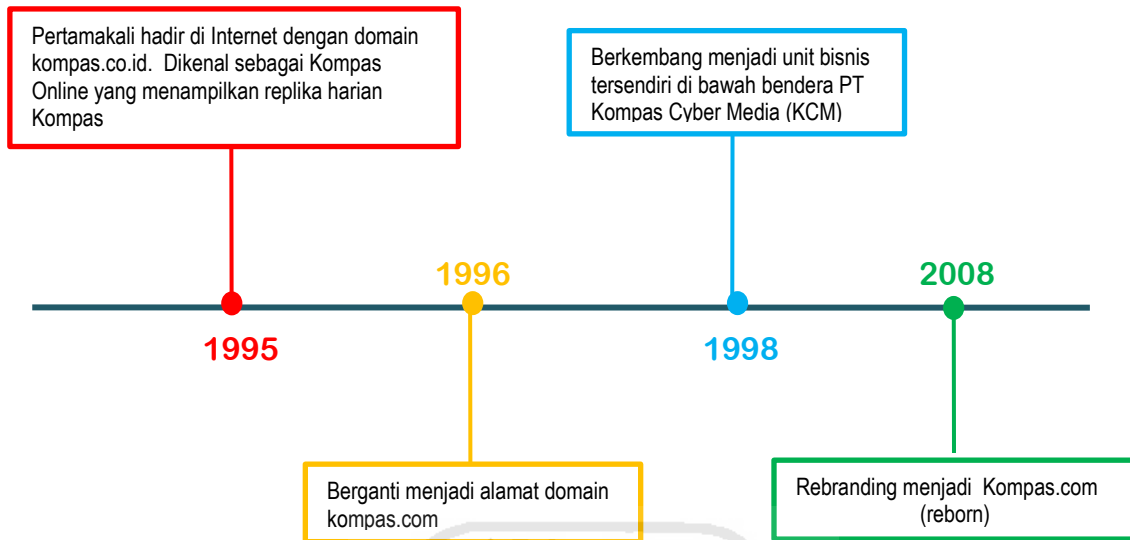
PT Kompas Cyber Media merupakan perusahaan media online yang seluruhnya dimiliki oleh grup Kompas Gramedia. Grup Kompas Gramedia didirikan oleh Jakob Oetama dan PK Ojong. Informasi mengenai Kompas Gramedia bisa dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_Gramedia.

Pengeluaran Kompas.com adalah untuk biaya karyawan di divisi editorial, bisnis, dan support functions, biaya event, biaya maintenance server dan pengembangan teknologi di bawah PT Kompas Cyber Media sebagai perusahaan berbadan hukum (Nomor TDP 09.05.1.73.37957) dengan izin usaha SIUP Nomor 00573/24.1.0/31.71-7.1001/1.824.271/2015.

Sebagai perusahaan media online yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran, integritas & transparansi menjadi komitmen kami. Untuk itu, maka seluruh catatan keuangan terbuka, untuk diakses oleh public. Pengeluaran Kompas.com seluruhnya didanai oleh pendapatan dari bisnis advertising, event production, dan content marketing. Sebagai media online yang mewarisi jurnalisme presisi dan jurnalisme makna yang diusung Jakob Oetama, Kompas.com mengedepankan akurasi dan independensi dalam setiap artikelnya. Kompas.com tak terkait dengan partai politik, non-partisan, menghargai perbedaan dan keragaman, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Kompas.com melarang setiap karyawan terlibat dalam kegiatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Perusahaan PT Kompas Cyber Media, yang berbunyi demikian: “Setiap karyawan dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan pada jam dan atau waktu kerja atau di luar jam dan atau waktu kerja dengan menggunakan fasilitas dan atau aset dan atau nama Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan. Kegiatan yang dilarang, antara lain: Melakukan propaganda politik baik lisan maupun tertulis; Menggunakan dan atau menempelkan dan atau menyebarluaskan segala atribut partai, antara lain: jaket, pakaian, bendera, pin, pamflet, selebaran, tanda gambar, slogan ataupun tanda/bentuk lain yang terkait dengan kegiatan politik; Memberikan dukungan kepada suatu kegiatan politik dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dan atau aset milik Perusahaan, antara lain: kendaraan dinas, telepon, facsimile, amplop, kertas surat, logo, komputer, dan atau jaringannya”.

5. Timeline



Gambar 2.1 Perjalanan kompas.com dalam lini masa

6. Awards

Berbagai penghargaan telah diterima oleh Kompas.com dari masa ke masa :

2010 - WAN IFRA Silver Award - Best in Social Media

2011 - WAN IFRA Silver Award - Best in Online Media

2012 - Indonesian Brand Champion Award - Brand Champion of Content Provider.

Most Populer Online News Provider Brand

Dian Award - Kementerian Perlindungan Perempuan & Perlindungan Anak: Media Inspirasi Perempuan Indonesia kategori Media Online

2014 - Digital Marketing Award - Great Performing Website (Category: News Portal)

2015 - Anugrah Adinegoro dalam rangka Hari Pers Nasional

Hasan Wirayuda Award - Kementerian Luar Negeri RI : Terbaik Kategori A (Jurnalis/Media)

2016 - Influential Brands - Top Brand Online News Platform

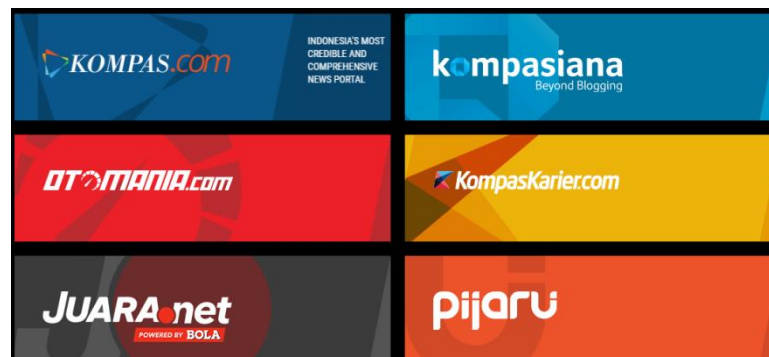
Digital Marketing Award - Great Performing Website (Category: News Site)

- 2017 - WOW Brand Award - Gold Champion (News Website Category)
 Superbrands - Superbrands Special Award (Online News Category)
 Anugrah Jurnalistik MH Thamrin – 3rd place (Online Faecture Category)
 Anugrah Jurnalistik MH Thamrin – 3rd place (Sport Feature Category)
- 2018 - WOW Brands Award - Bronze Champion (Online News Portal)
 Superbrands Indonesia - Trusted Online News
 Sertifikasi Jaringan Internasional Penguji Informasi (International Fact-Checking Network/IFCN)
- 2019 - WOW Brand Award - (News Website)
 Superbrands - (Trusted Online Media)

7. Products

Produk yang ada di Kompas.com :

- Brandzview ; Produk advertisement bersifat softselling dan edukatif yang digarap menggunakan standar jurnalistik dan gaya bahasa Kompas.com.
- Advertorial ; Produk advertisement bersifat hardselling yang digarap menggunakan standar jurnalistik dan gaya bahasa Kompas.com untuk mendorong promosi brand, produk atau jasa.
- Kilas ; Produk turunan Brandzview untuk memperkenalkan potensi pemerintah daerah, kementerian, dan instansi BUMN.
- Jixie ; Jixie menawarkan pilihan berita yang disesuaikan dengan minat dan ketertarikan pembaca.
- Sorot ; Sorot merupakan produk turunan dari content marketing untuk mendorong potensi bisnis produk dan jasa dari bermacam sektor industri.



Gambar 2.2 KCM Brands

B. Tempo.co (Tempo.co , 2019)

1. Tempo Media Group

Tempo mencanangkan tahun ini sebagai Total Transformasi Digital. Ada sejumlah alasan Tempo agresif mengembangkan *platform* digital dengan tumpuan awal media online Tempo.co. Pertama, Tempo harus cepat beradaptasi menghadapi perubahan pasar dan ekosistem di industri media. Industri media merupakan salah satu sektor yang paling terkena dampak *digital disruption*. Oplah media cetak terus menurun, dan porsi iklan untuk media cetak juga terus mengecil. Transformasi menuju media digital menjadi sebuah keniscayaan. Kedua, kelompok usia produktif penduduk Indonesia pada 2019 mencapai 183 juta orang, sekitar 118 juta atau hampir 65 persen di antaranya berusia 15-40 tahun. Mereka yang sangat melek teknologi informasi ini merupakan pasar yang sangat potensial untuk media digital. Ketiga, Tempo ingin menjadi *clearing house of information* dengan menghadirkan informasi yang dapat dipercaya di tengah sebaran hoaks, terutama di media sosial, yang kian meluas.

Transformasi digital ini sudah mulai menunjukkan hasilnya. Sirkulasi digital menunjukkan peningkatan yang menjanjikan. Aplikasi *all access* Tempo Media mendatangkan jumlah pelanggan berbayar yang signifikan meskipun masih belum mampu menggantikan pelanggan Tempo edisi cetak. Melalui aplikasi ini, pada tahap awal, pelanggan berbayar bisa mengakses Majalah Tempo dan Koran Tempo versi digital.

Tempo secara total juga terus mengembangkan produk-produk digital. Salah satunya adalah dengan mengembangkan aplikasi yang mengintegrasikan semua platform produk informasi: majalah, koran, dan digital. Dengan satu identitas (single ID), konsumen dapat mengakses semua platform ditambah arsip majalah Tempo sejak 1971. Tempo melayani setiap konsumen dengan cara berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pelanggan cukup mengakses informasi yang diperlukan, seperti berita politik, ekonomi, otomotif, dan selebritas.

Salah satu anak usaha Departemen Media, Tempo.co atau PT Info Media Digital (IMD), dalam dua tahun terakhir terus mengembangkan produk-produk turunannya, yakni

GoOto, Cantika, Teras.id, dan Foodizz. Teras.id merupakan produk kolaborasi tempo.co dengan media-media online di daerah.

Langkah paling strategis IMD pada adalah mengakuisisi 55 persen saham Rombak Pola Pikir Media, perusahaan *startup* yang memiliki tiga produk: kanal YouTube Kok Bisa?, Ziliun.com, dan Telusuri.id. Dari ketiga produk itu, Kok Bisa? paling fenomenal karena pasarnya adalah kalangan muda yang selama ini bukan pembaca media Tempo. Kanal Kok Bisa? Pada awal 2020 memiliki 1,9 juta pelanggan dengan total jumlah 194 juta penonton untuk seluruh videonya.

Berbekal kekuatan jurnalistik khas Tempo yang digabungkan dengan kecanggihan teknologi dan *big data*, Tempo.co hadir sebagai *platform* penyedia berita digital dalam bentuk *web-based* dan aplikasi *mobile*. Tempo.co menghadirkan berita dan informasi yang menarik, dapat diandalkan, independen, dan enak dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Berkat kolaborasi jurnalistik dan teknologi yang mumpuni. Kini, Tempo.co telah memiliki *unique visitor* sebanyak 35 juta perbulan dan 6,8 juta *followers* di seluruh platform media sosial.

2. Sejarah Tempo

Pendirian majalah Tempo pada 1971 diawali perundingan enam orang wartawan. Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah, dan Christianto Wibisono, berunding dengan Ciputra selaku pendiri/ketua Yayasan Jaya Raya, serta Eric Samola yang menjabat sebagai sekretaris. Rapat dilaksanakan di kantor Ciputra, di kawasan Proyek Senen. Pada hari yang sama rapat dilanjutkan malam hari sampai tuntas, di kediaman Ciputra di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Hasil perundingan itu menyepakati dibentuknya majalah Tempo yang dimodali Yayasan Jaya Raya.

Mengapa Tempo? Terdapat empat alasan mengapa nama “Tempo” dipilih sebagai nama majalah. Pertama, singkat dan bersahaja, mudah diucapkan oleh lidah Indonesia dari segala jurusan. Kedua, nama ini terdengar netral, tidak mengejutkan ataupun merangsang. Ketiga, nama ini bukan simbol suatu golongan. Dan akhirnya arti "Tempo" sederhana

saja, yaitu waktu sebuah pengertian yang dengan segala variasinya lazim dipergunakan oleh banyak penerbitan jurnalistik di seluruh dunia.

Pada Februari 1971, terbit edisi perkenalan majalah Tempo tanpa tanggal dengan cover berjudul “Tragedi Minarni dan Kongres PBSI”. Selanjutnya, 6 Maret 1971 edisi perdananya terbit dengan cover berjudul “Film Indonesia: Selamat Datang, Sex.” Dalam *masthead* terbitan awal tertera Yayasan Jaya Raya, Jaya Press sebagai penerbit.

Tiga tahun kemudian, pada 4 Februari 1974, Yayasan Jaya Raya dan PT Pikatan mendirikan PT Grafiti Pers, dengan kepemilikan saham bersama 50:50. PT Pikatan dibentuk oleh para pendiri Tempo agar karyawan-karyawannya berkesempatan memiliki saham. Sejak itulah dalam *masthead* tercantum PT Grafiti Pers sebagai penerbit majalah Tempo.

Edisi-edisi awal majalah Tempo mengetengahkan artikel seni, gaya hidup, dan perilaku yang sampai pada taraf tertentu terasa segar dan baru. Meski mulai memiliki pasar, dalam perjalanannya, majalah ini menemui sejumlah tantangan.

Pada 1982, untuk pertama kalinya, majalah Tempo dibredel karena dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya, Partai Golkar. Pembredelan itu dilakukan Pemerintah terhadap Tempo ini terkait dengan Pemilu 1982.

Pembredelan kedua terjadi pada 21 Juni 1994. Majalah Tempo dibredel pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko. Majalah ini dinilai terlalu keras mengkritik Habibie serta Soeharto ihwal pembelian kapal bekas dari Jerman Timur.

Selepas Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, mereka yang pernah bekerja di majalah Tempo tercerai-berai akibat pembredelan dan melakukan rembuk ulang untuk memutuskan perlu atau tidak majalah ini terbit kembali. Hasilnya, disepakati majalah Tempo harus terbit kembali. Maka, sejak 6 Oktober 1998, majalah ini pun hadir kembali di bawah naungan PT Arsa Raya Perdana.

Untuk meningkatkan skala dan kemampuan penetrasi ke bisnis dunia media, pada 2001, PT Arsa Raya Perdana, melakukan go public dan mengubah namanya menjadi PT Tempo Inti Media, Tbk. (Perseroan) sebagai penerbit majalah Tempo yang baru. Dana dari hasil go public dipakai menerbitkan Koran Tempo.

3. Filosofi Tempo

Filosofi Tempo tergambar dalam pengantar edisi pertama Tempo, Maret 1971. Ketika itu Goenawan Mohamad menulis:

Asas jurnalisme kami bukanlah jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya bahwa kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya bahwa tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melengkapinya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme majalah ini bukanlah jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba.

Nilai budaya Tempo adalah tepercaya, merdeka, dan profesional. Tepercaya didefinisikan sebagai menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan konsistensi. Merdeka adalah memberikan ruang untuk kebebasan, berfikir, dan berekspresi. Sedangkan profesional adalah memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya.

4. Penghargaan

Tim Digital Tempo.co memenangi Hackathon Jakarta Editors Lab 2018 di Universitas Multimedia Nusantara, Gading Serpong, Tangerang, Banten. Tim ini menyisihkan 12 peserta dari perusahaan media lain. Kemenangan itu didapat melalui proyek Leader Match. Ini adalah situs web responsif yang memungkinkan generasi milenial menemukan kandidat politik sesuai dengan keyakinan, minat dan kecenderungan politik dengan mekanisme ala aplikasi pencarian jodoh, Tinder. Aplikasi Tempo.co meraih Silver Award "The Best Mobile Media 2011" dari Asia Digital Media Award 2011. Tempo.co juga menjadi juara dunia dalam kompetisi hackathon media, yang diselenggarakan asosiasi Global Editors Network di Wina, Austria, 17 Juni 2016.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan

Lebih dari 100 hari virus Corona atau COVID-19 mengguncang Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Virus yang diduga berasal dari Wuhan China itu, membuat pemerintah mesti berlari kencang agar virus COVID-19 tidak menyebar luas. (Maulana, 2020)

Lalu bagaimana langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menangani pandemi Corona yang diberitakan oleh Tempo.co dan Kompas.com. Sebagai media yang mengikuti isu tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat selama bulan April-Mei 2020?

Penelitian ini menggunakan model analisis Robert N. Entman. Dalam model analisisnya, Entman menekankan pada empat perangkat framing untuk melihat suatu berita. Perangkat tersebut adalah *Define Problem* perangkat ini digunakan untuk melihat bagaimana isu atau peristiwa itu terjadi, sebagai apa isu atau masalah itu. Dengan kata lain perangkat ini mendefinisikan gagasan pokok suatu teks. Kemudian *Diagnose Causes*, perangkat ini untuk melihat apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Selanjutnya *Moral Judgement*, perangkat ini menjelaskan bagaimana suatu teks memunculkan nilai moral untuk menjelaskan masalah, dan yang terakhir *Treatment Recommendation* yaitu, tentang tawaran untuk mengatasi masalah atau isu tersebut.

Peneliti memilih dari 2 media, yakni Tempo.co dan Kompas.com.

1. Berita: 1

Tanggal : Sabtu, 11 April 2020

Judul : Breaking News: Pemerintah Setujui Status PSBB untuk Jawa Barat

Breaking News: Pemerintah Setujui Status PSBB untuk Jawa Barat

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanggulangan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan Kementerian Kesehatan dan tim sudah menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa wilayah di Jawa Barat per hari ini, Sabtu, 11 April 2020.

"Sesuai permintaan Gubernur Jawa Barat, sudah (disetujui)," ujar Yuri lewat pesan singkat, Sabtu, 11 April 2020.

Proposal pengajuan PSBB diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Gubernur Ridwan Kamil pada 8 April 2020. Ridwan Kamil mengajukan status PSBB untuk beberapa kabupaten/kota yakni; Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB, ada beberapa kriteria daerah yang dapat mengajukan status PSBB. Kriteria pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Daerah juga harus menyertakan data lengkap dengan kurva epidemiologi dalam hal ini.

Dalam Pasal 4 dijelaskan lebih lanjut, bahwa kepala daerah yang mengajukan status PSBB juga harus menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi dinilai sudah memenuhi sejumlah kriteria tersebut sehingga disetujui untuk menyanggah status PSBB.

<https://nasional.tempo.co/read/1330475/breaking-news-pemerintah-setujui-status-psbb-untuk-jawa-barat>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020)

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah Kementerian Kesehatan dan tim sudah menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (**PSBB**) untuk beberapa wilayah di Jawa Barat mulai dari hari Sabtu, 11 April 2020, tercantum dalam paragraf ke 1, sedangkan nama wilayah di Jawa Barat yang disetujui untuk melaksanakan PSBB tercantum pada paragraf ke 6 dari berita tersebut.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanggulangan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan Kementerian Kesehatan dan tim sudah menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa wilayah di Jawa Barat per hari ini, Sabtu, 11 April 2020.

Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi dinilai sudah memenuhi sejumlah kriteria tersebut sehingga disetujui untuk menyangang status PSBB.

Diagnoses Cause, Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil telah mengusulkan proposal PSBB pada tanggal 8 April 2020. Tercantum pada berita di paragraf ke 3

Proposal pengajuan PSBB diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Gubernur Ridwan Kamil pada 8 April 2020. Ridwan Kamil mengajukan status PSBB untuk beberapa kabupaten/kota yakni; Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Moral Judgement. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Usulan PSBB dari Kepala Daerah harus menyiapkan detail tindakan yang mencakup rencana aksi, pembagian tugas, dan teknis pelaksanaan pembatasan. Hal tersebut menjadi acuan pemerintah untuk mengukur dampak yang ditimbulkan akibat pembatasan sosial. Tercantum pada berita pada paragraf ke 4 dan 5.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB, ada beberapa kriteria daerah yang dapat mengajukan status PSBB. Kriteria pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Daerah juga harus menyertakan data lengkap dengan kurva epidemiologi dalam hal ini.

Treatment Recommendation. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), aspek lain yang dipertimbangkan dalam menyetujui Usulan PSBB dari Kepala Daerah adalah kesiapan pemerintah daerah menghadapi dampak pembatasan sosial. Pemerintah daerah dianggap memenuhi syarat jika menyiapkan rencana anggaran dan pelaksanaan bantuan kepada warga yang terkena dampak. Hal ini tercantum pada berita pada paragraph ke 6

Dalam Pasal 4 dijelaskan lebih lanjut, bahwa kepala daerah yang mengajukan status PSBB juga harus menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Tabel 3.1. Analisis Berita 1

Element	Tempo.co
<i>Define Problem</i>	Kementerian Kesehatan sudah menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa wilayah di Jawa Barat
<i>Diagnose Causes</i>	Proposal pengajuan PSBB diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Gubernur Ridwan Kamil pada 8 April 2020
<i>Moral Judgement</i>	Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB, Jawa Barat sudah memenuhi kriteria daerah yang dapat mengajukan status PSBB.

<i>Treatment Recommendation</i>	Kepala Daerah yang mengajukan status PSBB harus menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.
---------------------------------	--

2. Berita : 2

Tanggal : Sabtu, 11 April 2020

Judul : Kemenkes Setujui PSBB Depok, Bogor, dan Bekasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

"Yang diminta oleh Gubernur Jawa Barat sudah disetujui," ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4/2020).

PSBB untuk lima daerah ini sebelumnya telah diajukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Kemenkes.

Ridwan Kamil mengatakan, PSBB di lima daerah itu akan satu zonasi dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran virus corona atau Covid-19

Ia berharap, PSBB bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jabar.

Menurut Emil, PSBB diartikan mirip lockdown, namun relatif masih fleksibel.

"Pak Wapres menyepakati agar kota-kota di Jabar dan Banten yang masuk Jabodetabek untuk mengajukan PSBB, karena waktunya bersamaan bisa dikoordinasikan oleh gubernurnya," ucap Emil.

Tangerang dan Tangsel

Selain Bekasi, Bogor, dan Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan disebut sudah mengajukan PSBB juga ke Kemenkes.

Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah mengungkapkan telah mengajukan PSBB ke Provinsi Banten guna mengikuti langkah PSBB di Jakarta.

Adapun pengajuan meminta status PSBB ini dilakukan karena status PSBB DKI Jakarta diprediksi akan sangat berdampak pada Kota Tangerang.

Arief menyampaikan, salah satu faktor yang akan berdampak secara signifikan yakni penurunan arus transportasi yang melintas di Kota Tangerang.

Dalam surat yang diajukan berisi permintaan arahan tentang rencana PSBB. Harapannya, dengan terwujudnya status PSBB ini dapat menekan laju penyebaran virus corona di Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengklaim sudah menganggarkan Rp 100 miliar untuk menjalankan PSBB.

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan anggaran tersebut kemungkinan akan bertambah.

Pasalnya selain disiapkan untuk PSBB, juga dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Mulai dari kesehatan, keamanan, dan distribusi barang. Sebagai kesiapan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dan TNI.

Penerapan kebijakan PSBB tersebut, imbuhnya dilakukan setelah adanya rapat pimpinan daerah oleh Gubernur Banten dan DKI Jakarta pada Rabu (8/4/2020).

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/18443341/kemenkes-setujui-psbb-depok-bogor-dan-bekasi?page=all>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020)

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (**PSBB**) untuk wilayah di Jawa Barat, tercantum dalam paragraf ke 1.

Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

Diagnoses Cause, Permintaan dari Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil telah meminta persetujuan untuk penerapan PSBB kepada Kemenkes. Tercantum pada berita di paragraf ke 2 dan 3

"Yang diminta oleh Gubernur Jawa Barat sudah disetujui," ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4/2020).

PSBB untuk lima daerah ini sebelumnya telah diajukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Kemenkes.

Moral Judgement. Berdasarkan pengajuan dari Gubernur Jawa Barat mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kemenkes, lima daerah itu akan satu zonasi dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran virus corona. Ridwan Kamil berharap bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jabar. Hal itu tertulis dalam paragraf 4, dan 5

Ridwan Kamil mengatakan, PSBB di lima daerah itu akan satu zonasi dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran virus corona atau Covid-19

Ia berharap, PSBB bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jabar.

Treatment Recommendation. Untuk menjalankan PSBB, Pemerintah Tangerang Selatan telah menganggarkan 100 miliar untuk penanganan Covid-19 mulai dari kesehatan, keamanan dan distribusi barang. Hal ini tercantum pada berita pada paragraf ke 12, 13 dan 14

Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengklaim sudah menganggarkan Rp 100 miliar untuk menjalankan PSBB.

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan anggaran tersebut kemungkinan akan bertambah.

Pasalnya selain disiapkan untuk PSBB, juga dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Mulai dari kesehatan, keamanan, dan distribusi barang. Sebagai kesiapan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dan TNI.

Tabel 3.2. Analisis Berita 2

Element	Kompas.com
<i>Define Problem</i>	Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat.
<i>Diagnose Causes</i>	Permintaan dari Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil telah meminta persetujuan untuk penerapan PSBB kepada Kemenkes
<i>Moral Judgement</i>	PSBB telah diajukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Kemenkes, untuk lima daerah di Jawa Barat itu akan satu zonasi dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran Covid-19.
<i>Treatment Recommendation</i>	. Untuk menjalankan PSBB, Pemerintah Tangerang Selatan telah menganggarkan 100 miliar untuk penanganan Covid-19 mulai dari kesehatan, keamanan dan distribusi barang

3. Berita : 3

Tanggal : Minggu, 12 April 2020

Judul : Ridwan Kamil: PSBB di Bodebek Mulai Rabu 15 April 2020

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, akan dimulai Rabu, 15 April 2020.

"Kami koordinasikan dan menetapkan bahwa PSBB di 5 wilayah ini akan dimulai hari Rabu, dini hari, tanggal 15 April 2020 ini selama 14 hari," kata Ridwan dalam konferensi pers yang ditayangkan lewat streaming dari Gedung Negara Pakuan, Bandung, Ahad, 12 April 2020.

Setelah 14 hari, pihaknya akan mengevaluasi apakah PSBB diteruskan atau dikurangi intensitasnya. Ridwan mengatakan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang persetujuan PSBB untuk wilayah Bodebek sudah diterimanya, Sabtu sore, 11 April 2020.

Hari ini, Ridwan menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Jawa Barat, 5 bupati/wali kota di wilayah Bodebek, serta Wakapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya via video conference. Sebagian wilayah Bodebek, diantaranya Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Ridwan Kamil mengatakan, bersamaan dengan pelaksanaan PSBB tersebut, di Bodebek akan dimaksimalkan tes masif untuk pelacakan kasus Covid-19. "Kami sudah berkomitmen selama PSBB 14 hari ini, tes masif sebagai metode pelacakan persebaran virus akan kami maksimalkan," kata dia.

"Hari ini ini para kepala daerah wilayah tersebut akan berkoordinasi dengan Gubernur dan Tim Gugus Tugas Covid Jawa Barat," kata Ridwan Kamil lewat akun Twitter resminya pada Ahad, 12 April 2020.

Ia mengatakan Senin, 13 April dan Selasa, 14 April 2020, pemerintah akan menyosialisasikan kepada masyarakat terdampak. "Kemungkinan Rabu atau Kamis, penerapan PSBB akan dimulai," kata Ridwan Kamil.

Ia meminta semua masyarakat menaati aturan PSBB. Emil, sapaan mantan Wali Kota Bandung ini, memastikan pemerintah menjamin logistik pangan dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.

"Insya Allah dengan kekompakan para pemangku kepentingan wilayah Jabodetabek, maka masalah ini bisa dikendalikan dengan lebih baik dan terukur," katanya.

<https://nasional.tempo.co/read/1330771/ridwan-kamil-berlakukan-psbb-bodebek-mulai-rabu-depan>, diakses pada 11 November 2020)

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah Pemberlakuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa wilayah kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi akan dimulai hari Rabu, 15 April 2020 seperti yang disebutkan dalam paragraph ke 1

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, akan dimulai Rabu, 15 April 2020.

Diagnoses Cause, Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil memberlakukan Pembatasan Sosial di Bodebek berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Kesehatan yang sudah diterimanya seperti yang tercantum pada berita di paragraf ke 3

Ridwan mengatakan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang persetujuan PSBB untuk wilayah Bodebek sudah diterimanya, Sabtu sore, 11 April 2020.

Moral Judgement. Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 diantaranya pertimbangannya Epidemiologis, hal ini pun tersirat dari pernyataan Gubernur Ridwan Kamil tentang akan memaksimalkan dilaksanakannya tes massif untuk melacak persebaran virus Covid-19 seperti yang dicantumkan pada paragraph 5

Ridwan Kamil mengatakan, bersamaan dengan pelaksanaan PSBB tersebut, di Bodebek akan dimaksimalkan tes masif untuk pelacakan kasus Covid-19. "Kami sudah berkomitmen selama PSBB 14 hari ini, tes masif sebagai metode pelacakan persebaran virus akan kami maksimalkan," kata dia.

Treatment Recommendation. Salah satu pertimbangan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah Pusat adalah kesiapan Pemerintah Daerah sudah mempersiapkan rencana anggaran dan pelaksanaan pemberian bantuan kepada warga yang terkena dampak. Kesiapan Pemerintah Daerah ditunjukkan pada paragraph 8

Ia meminta semua masyarakat menaati aturan PSBB. Emil, sapaan mantan Wali Kota Bandung ini, memastikan pemerintah menjamin logistik pangan dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Tabel 3.3. Analisis Berita 3

Element	Tempo.co
<i>Define Problem</i>	Pemberlakuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa wilayah kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi akan dimulai hari Rabu, 15 April 2020
<i>Diagnose Causes</i>	Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil memberlakukan Pembatasan Sosial di Bodebek berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Kesehatan
<i>Moral Judgement</i>	Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 diantaranya pertimbangannya Epidemiologis
<i>Treatment Recommendation</i>	Pemerintah Daerah sudah mempersiapkan rencana anggaran dan pelaksanaan pemberian bantuan kepada warga yang terkena dampak.

4. Berita : 4
Tanggal : Minggu, 12 April 2020
Judul : Ridwan Kamil: PSBB di Bogor, Depok, Bekasi Diterapkan Mulai Rabu, 15 April

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi diterapkan di yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi mulai Rabu (15/4/2020).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, status PSBB akan diterapkan selama 14 atau sampai 28 April 2020.

“Kami tetapkan bahwa PSBB di 5 wilayah mulai Rabu dini hari tanggal 15 bulan April 2020 selama 14 hari. Setelah 14 hari nanti kita evaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya,” kata Emil dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube Pemprov Jawa Barat, Minggu (12/4/2020).

Selanjutnya, teknis sanksi bagi para pelanggar aturan PSBB akan diatur oleh masing-masing wali kota dan bupati.

“Sanksi diserahkan ke Wali Kota dan Bupati menyesuaikan kebijakan diskresi Wali Kota dan Bupati,” ungkap Emil.

Sebelumnya diketahui, Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Sabtu (11/4/2020) kemarin.

Adapun, Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan status PSBB di Jakarta mulai Jumat (10/4/2020) selama 14 hari atau sampai 23 April 2020.

Warga Jakarta diminta mematuhi pembatasan social berskala besar (PSBB) guna memutus rantai penularan Covid-19. Sebab, belum ada tanda-tanda perlambatan penularan Covid-19, baik di level Jakarta maupun skala nasional.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/12/17302811/ridwan-kamil-psbb-di-bogor-depok-bekasi-diterapkan-mulai-rabu-15-april>, diakses pada 10 Oktober 2020)

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi diterapkan di lima wilayah di Jawa Barat mulai tanggal 15 April 2020 sampai tanggal 28 April 2020. Setelah 14 hari tersebut akan diadakan evaluasi sebagai pertimbangan diperpanjang atau pengurangan intensitas PSBB di Jawa Barat. Seperti yang disebutkan dalam paragraph ke 1, 2, dan 3

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi diterapkan di yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi mulai Rabu (15/4/2020).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, status PSBB akan diterapkan selama 14 atau sampai 28 April 2020.

“Kami tetapkan bahwa PSBB di 5 wilayah mulai Rabu dini hari tanggal 15 bulan April 2020 selama 14 hari. Setelah 14 hari nanti kita evaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya,” kata Emil dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube Pemprov Jawa Barat, Minggu (12/4/2020).

Diagnoses Cause, Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat seperti yang tercantum pada berita di paragraf ke 6

Sebelumnya diketahui, Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Sabtu (11/4/2020) kemarin.

Moral Judgement. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jabar, penegakan aturan serta teknis sanksi PSBB akan disesuaikan oleh kebijakan masing-masing Wali Kota dan Bupati. Seperti yang dicantumkan pada paragraph 4 dan 5

Selanjutnya, teknis sanksi bagi para pelanggar aturan PSBB akan diatur oleh masing-masing wali kota dan bupati.

“Sanksi diserahkan ke Wali Kota dan Bupati menyesuaikan kebijakan diskresi Wali Kota dan Bupati,” ungkap Emil.

Treatment Recommendation. Salah satu pertimbangan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah penerapan status PSBB di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga Warga Jakarta diharap dapat mematuhi PSBB. Hal tersebut ditunjukkan pada paragraf 8

Adapun, Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan status PSBB di Jakarta mulai Jumat (10/4/2020) selama 14 hari atau sampai 23 April 2020.

Warga Jakarta diminta mematuhi pembatasan social berskala besar (PSBB) guna memutus rantai penularan Covid-19. Sebab, belum ada tanda-tanda perlambatan penularan Covid-19, baik di level Jakarta maupun skala nasional.

Tabel 3.4. Analisis Berita 4

Element	Tempo.co
<i>Define Problem</i>	Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi mulai hari Rabu, 15 April 2020
<i>Diagnose Causes</i>	Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosia Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat
<i>Moral Judgement</i>	Sanksi bagi para pelanggar aturan PSBB akan diatur menyesuaikan kebijakan yang diambil oleh Wali Kota dan Bupati

<i>Treatment Recommendation</i>	Pemerintah Daerah sudah mempersiapkan rencana anggaran dan pelaksanaan pemberian bantuan kepada warga yang terkena dampak.
---------------------------------	--

5. Berita : 5

Tanggal : 23 April 2020

Judul : Jawa Barat Awasi Warganya di 97 Titik Pemeriksaan

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan warga Bandung Raya untuk tidak bepergian dan tetap tinggal di rumah selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dimulai kemarin. Ia menuturkan pemerintah akan mengawasi kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan di 97 titik pemeriksaan.

Ridwan mengatakan pemeriksaan yang dilakukan bermacam-macam, misalnya penggunaan masker dan jumlah penumpang di dalam kendaraan roda empat. “Kalau mobil sedan maksimal tiga orang, dengan dua orang di tengah. Hal yang kami cek juga adalah niat kegiatan,” kata dia saat meninjau titik pemeriksaan di Jatinangor, Sumedang, kemarin.

Gubernur menyatakan bakal menindak warganya yang bepergian tanpa alasan yang kuat. Bahkan, kata dia, polisi memberikan surat tilang kepada warga yang melanggar. “Sanksi pertama adalah surat tilang atau surat teguran. Kalau Anda tercatat, saat membuat surat berkelakuan baik, akan dimasukkan sebagai pelanggaran hukum,” ucap dia.

Menurut Ridwan, warga yang akan keluar rumah dengan alasan kepentingan mendesak harus memiliki surat izin dari ketua rukun tetangga setempat. Ia juga memastikan jumlah kendaraan yang menuju Bandung Raya telah turun pada hari pertama pembatasan sosial.

Wilayah Bandung Raya terdiri atas Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang, menerapkan pembatasan sosial mulai kemarin hingga 6 Mei mendatang.

Penerapan pembatasan sosial juga mensyaratkan adanya bantuan sosial kepada masyarakat dari pemerintah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, M. Arifin Soedjayana, mengatakan penyaluran bantuan sosial difokuskan di 10 daerah yang memberlakukan PSBB yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Bandung Raya.

Per 21 April, sebanyak 5.237 paket bantuan sudah disalurkan,” kata dia, kemarin.

Arifin menjelaskan, pemerintah Jawa Barat menargetkan penyaluran bantuan sosial kepada 204.085 rumah tangga sasaran. Tiap paket terdiri atas uang tunai Rp. 150 ribu dan bahan makanan. Penyaluran bantuan sosial tersebut melibatkan PT Pos Indonesia yang bekerja sama dengan ojek daring dan ojek pangkalan.

<https://koran.tempo.co/read/nasional/452104/jawa-barat-awasi-warganya-di-97-titik-pemeriksaan>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020)

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah Pemerintah Jawa Barat Awasi Warganya di 97 Titik Pemeriksaan seperti yang disebutkan dalam paragraph ke 1

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan warga Bandung Raya untuk tidak bepergian dan tetap tinggal di rumah selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dimulai kemarin. Ia menuturkan pemerintah akan mengawasi kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan di 97 titik pemeriksaan.

Diagnoses Cause, Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 22 April hingga 6 Mei 2020 seperti yang tercantum pada berita di paragraf ke 1 dan ke 5

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan warga Bandung Raya untuk tidak bepergian dan tetap tinggal di rumah selama pelaksanaan

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dimulai kemarin. Ia menuturkan pemerintah akan mengawasi kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan di 97 titik pemeriksaan.

Wilayah Bandung Raya terdiri atas Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang, menerapkan pembatasan sosial mulai kemarin hingga 6 Mei mendatang.

Moral Judgement. Pemerintah Daerah Jawa Barat akan menindak warganya yang bepergian melanggar PSBB dan memberikan sanksi kepada warga yang melanggar seperti yang dicantumkan pada paragraph 3

Gubernur menyatakan bakal menindak warganya yang bepergian tanpa alasan yang kuat. Bahkan, kata dia, polisi memberikan surat tilang kepada warga yang melanggar. “Sanksi pertama adalah surat tilang atau surat teguran. Kalau Anda tercatat, saat membuat surat berkelakuan baik, akan dimasukkan sebagai pelanggaran hukum,” ucap dia.

Treatment Recommendation. Salah satu pertimbangan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah Pusat adalah kesiapan Pemerintah Daerah sudah mempersiapkan rencana anggaran dan pelaksanaan pemberian bantuan kepada warga yang terkena dampak. Kesiapan Pemerintah Daerah ditunjukkan pada paragraph 6 dan 7

Penerapan pembatasan sosial juga mensyaratkan adanya bantuan sosial kepada masyarakat dari pemerintah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, M. Arifin Soedjayana, mengatakan penyaluran bantuan sosial difokuskan di 10 daerah yang memberlakukan PSBB yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Bandung Raya. Per 21 April, sebanyak 5.237 paket bantuan sudah disalurkan,” kata dia, kemarin.

Arifin menjelaskan, pemerintah Jawa Barat menargetkan penyaluran bantuan sosial kepada 204.085 rumah tangga sasaran. Tiap paket terdiri atas uang tunai Rp. 150 ribu dan bahan makanan. Penyaluran bantuan sosial tersebut melibatkan PT Pos Indonesia yang bekerja sama dengan ojek daring dan ojek pangkalan.

Tabel 3.5. Analisis Berita 5

Element	Tempo.co
<i>Define Problem</i>	Pemerintah Jawa Barat Awasi Warganya di 97 Titik Pemeriksaan
<i>Diagnose Causes</i>	Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 22 April hingga 6 Mei 2020
<i>Moral Judgement</i>	Pemerintah Daerah Jawa Barat akan menindak warganya yang bepergian melanggar PSBB dan memberikan sanksi kepada warga yang melanggar
<i>Treatment Recommendation</i>	Pemerintah Daerah sudah mempersiapkan rencana anggaran dan pelaksanaan pemberian bantuan kepada warga yang terkena dampak.

6. Berita : 6

Tanggal : 21 April 2020

Judul : PSBB di Bandung Raya Dijaga 4.494 Personel Gabungan, Siagakan 97 Pos Check Point

BANDUNG, KOMPAS.com – Jelang pembatasan sosial berskala besar (PSBB), petugas gabungan siap melakukan pengamanan di wilayah Bandung Raya. Adapun seluruh personel yang dilibatkan sebanyak 4.494 personel gabungan.

"Polri siapkan pengaman PSBB seluruh personel dilibatkan dalam pengamanan, seperti TNI, Polri, Dishub, dan Pol PP, seluruhnya 4.494," kata Kepala Bidang

Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga, di Mapolda Jabar, Selasa (21/4/2020).

Selain itu, polisi juga telah menyiapkan pos check point di seluruh Bandung Raya. "Pos cek point disiapkan seluruhnya 97 lokasi di lima Kabupaten Kota di Bandung Raya," kata Erlangga.

Check point

Adapun kekuatan personel di masing-masing wilayah termasuk pos check point-nya adalah sebagai berikut:

Untuk Polrestabes Bandung, sekitar 2.590 kekuatan personel diturunkan. Adapun pos check point ada 19 titik, yakni di batas kota 4 pos, gate tol 5 pos, dan 10 pos di dalam kota. Polresta Bandung menurunkan sekitar 480 personel, dan menempatkan sekitar 16 pos check point.

Untuk Polres Cimahi sekitar 842 personel diterjunkan akan melakukan pengamanan di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) serta terdapat sekitar 21 pos check point yang telah disiapkan.

Sedangkan di Polres Sumedang, ada sekitar 1.134 personel yang diterjunkan dan 36 pos check point disiapkan, yakni terdiri dari 7 check point di batas kabupaten, 3 di zona merah, dan 26 check point biasa.

Menurut Erlangga, nantinya petugas yang berjaga di pos check point akan melakukan pemeriksaan terhadap arus keluar masuk baik di Kota Bandung, termasuk wilayah Bandung Raya. "Seperti pemeriksaan suhu tubuh, imbauan penggunaan masker, dan di dalam pembatasan, kapasitas kendaraan 50 persen dari kapasitas kendaraan," kata Erlangga

Sosialisasi sanksi

Terkait sanksi, pihaknya akan melakukan langkah sosialisasi setelah keluar Peraturan Gubernur (Pergub) dan pemberlakuan PSBB pada Rabu (22/4/2020) dini hari nanti.

"Langkah sosialisasi kepada masyarakat dan nanti kita lakukan cara persuasif dan humanis dan teguran," kata Erlangga.

Dia mengatakan, penerapan PSBB ini dilakukan tergantung di wilayah masing-masing. "Seperti di Kabupaten Bandung yang parsial," tuturnya.

<https://bandung.kompas.com/read/2020/04/21/12501831/psbb-di-bandung-roya-dijaga-4494-personel-gabungan-siagakan-97-pos-check>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020)

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah petugas gabungan (TNI, Polri, Dishub, dan Pol PP), seluruhnya 4.494 personil siap melakukan pengamanan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Bandung Raya seperti yang disebutkan dalam paragraf ke 1 dan 2

BANDUNG, KOMPAS.com - Jelang pembatasan sosial berskala besar (PSBB), petugas gabungan siap melakukan pengamanan di wilayah Bandung Raya. Adapun seluruh personel yang dilibatkan sebanyak 4.494 personel gabungan.

"Polri siapkan pengaman PSBB seluruh personel dilibatkan dalam pengamanan, seperti TNI, Polri, Dishub, dan Pol PP, seluruhnya 4.494," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga, di Mapolda Jabar, Selasa (21/4/2020)

Diagnoses Cause, Covid -19 dapat menular melalui kerumunan atau keramaian dan juga transmisi lokal ataupun antar daerah sehingga dilakukan penyekatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Oleh karena itu perlu pengamanan terpadu di lokasi keluar-masuk pergerakan arus manusia antar wilayah atau antar daerah di 97 lokasi di lima Kabupaten Kota di Bandung Raya. Hal ini tercantum pada paragraf 3 dan 4

Selain itu, polisi juga telah menyiapkan pos check point di seluruh Bandung Raya.

"Pos cek point disiapkan seluruhnya 97 lokasi di lima Kabupaten Kota di Bandung Raya," kata Erlangga.

Moral Judgement. Covid -19 dapat menular melalui kerumunan atau keramaian dan juga transmisi lokal ataupun antar daerah sehingga dilakukan penyekatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas, bagi yang melanggar ketentuan PSBB akan diberikan sanksi . Hal ini tersirat pada paragraf 10

Terkait sanksi, pihaknya akan melakukan langkah sosialisasi setelah keluar Peraturan Gubernur (Pergub) dan pemberlakuan PSBB pada Rabu (22/4/2020) dini hari nanti.

Treatment Recommendation. Agar seluruh warga masyarakat khususnya Bandung Raya mengetahui dan dapat mentaati ketentuan PSBB yang apa yang dilakukan di pos check point seperti pemeriksaan suhu tubuh, pembatasan jumlah orang 50 % dari kapasitas kendaraan maka perlu dilakukan sosialisasi dengan cara persuasif yang humanis seperti yang ditunjukkan pada paragraf 9 dan 11.

"Seperti pemeriksaan suhu tubuh, imbauan penggunaan masker, dan di dalam pembatasan, kapasitas kendaraan 50 persen dari kapasitas kendaraan," kata Erlangga

"Langkah sosialisasi kepada masyarakat dan nanti kita lakukan cara persuasif dan humanis dan teguran," kata Erlangga.

Tabel 3.6. Analisis Berita 6

Element	Kompas.com
<i>Define Problem</i>	Petugas gabungan (TNI, Polri, Dishub, dan Pol PP), seluruhnya 4.494 personil siap melakukan pengamanan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Bandung Raya
<i>Diagnose Causes</i>	Pengamanan terpadu di lokasi keluar-masuk pergerakan arus manusia antar wilayah atau antar daerah di 97 lokasi di lima Kabupaten Kota di Bandung Raya
<i>Moral Judgement</i>	Covid -19 dapat menular melalui kerumunan atau keramaian dan juga transmisi lokal ataupun antar daerah sehingga dilakukan penyekatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas, bagi yang melanggar ketentuan PSBB akan diberikan sanksi

<i>Treatment Recommendation</i>	Agar seluruh warga masyarakat khususnya Bandung Raya mengetahui dan dapat mentaati ketentuan PSBB maka perlu dilakukan sosialisasi dengan cara persuasif yang humanis
---------------------------------	---

7. Berita : 7

Tanggal : 23 April 2020

Judul : PSBB Bodebek Diperpanjang 14 Hari Mulai 29 April

INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, memastikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) akan diperpanjang selama 14 hari mulai Rabu, 29 April 2020.

"PSBB Bodebek akan diperpanjang 14 hari ke depan mulai hari Rabu besok, sudah diputuskan," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 27 April 2020.

Berdasarkan keterangan tertulis Humas Jabar, Emil mengatakan sejak PSBB diterapkan pada 15 April lalu, di Bodebek terjadi penurunan tren persebaran penularan Covid-19, terutama di tiga wilayah, yaitu Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok. Namun, masih terdapat kenaikan kasus di Kota dan Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi salah satu alasan perlunya perpanjangan masa PSBB Bodebek.

"Jadi berita (kabar) ini highlight-nya, PSBB Bodebek berhasil khususnya di tiga wilayah," kata Emil.

Secara umum, lanjutnya, terjadi penurunan kasus Covid-19 hingga 38,5 persen di PSBB Jabodetabek. "Artinya, PSBB dianggap baik dan berhasil menekan persebaran Covid-19," ujar Emil.

Selain PSBB Bodebek, Emil menuturkan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar juga akan mengevaluasi PSBB Bandung Raya, yang hingga Senin, 27 April 2020, baru menjejak hari keenam. Sementara, untuk status perpanjangan PSBB Bandung Raya akan diputuskan minggu depan.

"Hal yang sama akan kami evaluasi pada minggu depan untuk PSBB Bandung Raya," tutur Emil.

Selain itu, Emil yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar melaporkan perkembangan kasus di Jabar. Hingga Jumat, 24 April 2020, pukul 16.43 WIB, terdapat 912 kasus positif Covid-19, 93 orang sembuh, dan 77 orang meninggal dunia.

Sementara terdapat total 39.043 orang dalam pemantauan (ODP), dengan 8.935 orang masih dalam proses pemantauan serta total 4.373 pasien dalam pengawasan (PDP), 2.049 orang masih dalam pengawasan.

"Lalu terkait penanganan kesehatan secara umum, sudah hampir 100 ribu tes masif yang kami lakukan dengan metode RDT (Rapid Diagnostic Test). Hasilnya 2.000-an positif, akan kita tindak lanjuti dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction)," ujar Emil. ()*

<https://nusantara.tempo.co/nusantara/196/psbb-bodebek-diperpanjang-14-hari-mulai-29-april>, diakses pada tanggal 11 November 2020)

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah Pemerintah Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil, memastikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) akan diperpanjang selama 14 hari mulai Rabu, 29 April 2020 seperti yang disebutkan dalam paragraph ke 1

INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, memastikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) akan diperpanjang selama 14 hari mulai Rabu, 29 April 2020.

Diagnoses Cause, Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) diperpanjang dengan melihat pola persebaran penularan Covid-19 di Bodebek seperti yang tercantum pada berita di paragraf ke 3

Berdasarkan keterangan tertulis Humas Jabar, Emil mengatakan sejak PSBB diterapkan pada 15 April lalu, di Bodebek terjadi penurunan tren persebaran penularan Covid-19, terutama di tiga wilayah, yaitu Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok. Namun, masih terdapat kenaikan kasus di Kota dan Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi salah satu alasan perlunya perpanjangan masa PSBB Bodebek.

Moral Judgement. Pemerintah Daerah Jawa Barat memperpanjang PSBB di Bodebek sesuai dengan kriteria Peraturan Pemerintah tentang PSBB dengan melihat jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat serta menyebar secara signifikan ke beberapa wilayah. Hal ini tersirat pada paragraph 8 dan 9.

Selain itu, Emil yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar melaporkan perkembangan kasus di Jabar. Hingga Jumat, 24 April 2020, pukul 16.43 WIB, terdapat 912 kasus positif Covid-19, 93 orang sembuh, dan 77 orang meninggal dunia.

Sementara terdapat total 39.043 orang dalam pemantauan (ODP), dengan 8.935 orang masih dalam proses pemantauan serta total 4.373 pasien dalam pengawasan (PDP), 2.049 orang masih dalam pengawasan.

Treatment Recommendation. Untuk menindak lanjuti penanganan permasalahan kesehatan ini maka ditindak lanjuti dengan serangkaian tes diagnostik kepada warga masyarakat untuk melacak dan mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19 ditunjukkan pada paragraph 10

"Lalu terkait penanganan kesehatan secara umum, sudah hampir 100 ribu tes masif yang kami lakukan dengan metode RDT (Rapid Diagnostic Test). Hasilnya 2.000-an positif, akan kita tindak lanjuti dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction)," ujar Emil.

Tabel 3.7. Analisis Berita 7

Element	Tempo.co
<i>Define Problem</i>	Pemerintah Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil, memastikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) akan diperpanjang selama 14 hari mulai Rabu, 29 April 2020
<i>Diagnose Causes</i>	Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) diperpanjang dengan melihat pola persebaran penularan Covid-19 di Bodebek
<i>Moral Judgement</i>	Pemerintah Daerah Jawa Barat memperpanjang PSBB di Bodebek sesuai dengan kriteria Peraturan Pemerintah tentang PSBB dengan melihat jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat
<i>Treatment Recommendation</i>	Untuk menindak lanjuti penanganan permasalahan kesehatan ini maka ditindak lanjuti dengan serangkaian tes diagnostic Covid-19

8. Berita : 8
 Tanggal : 28 April 2020
 Judul : PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi Diperpanjang 2 Pekan

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) diperpanjang.

PSBB diperpanjang selama dua pekan dan akan dimulai pada Rabu (29/4/2020).

" PSBB Bodebek akan diperpanjang 14 hari ke depan, mulai hari Rabu besok, sudah diputuskan," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2020).

Menurut Emil, selama dua pekan terakhir, terjadi penurunan tren penyebaran atau penularan Covid-19.

Hal itu khususnya di tiga wilayah, yaitu Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok.

Namun, kenaikan kasus masih terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Namun, secara umum terjadi penurunan kasus Covid-19 hingga 38,5 persen di PSBB Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Jadi berita ini highlight-nya, PSBB Bodebek berhasil, khususnya di tiga wilayah. Artinya, PSBB dianggap baik dan berhasil menekan persebaran Covid-19," ujar Emil.

Selain itu, Emil mengatakan, Pemprov Jabar akan mengevaluasi PSBB di Bandung Raya yang baru sepekan berjalan.

Menurut dia, status perpanjangan PSBB di Bandung Raya akan diputuskan pekan depan.

"Hal yang sama akan kami evaluasi pada minggu depan untuk PSBB Bandung Raya," kata dia.

Sebelumnya, Ridwan Kamil secara resmi mengumumkan pemberlakuan PSBB di wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang).

PSBB di Bandung Raya dimulai pada 22 April 2020 dan berlaku selama dua pekan.

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/28/13550521/psbb-di-bogor-depok-dan-bekasi-diperpanjang-2-pekan?page=all>, diakses pada 10 Oktober 2020

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) diperpanjang selama 14 hari mulai hari Rabu, 29 April 2020 seperti yang disebutkan dalam paragraf ke 1 dan 2

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) diperpanjang

PSBB diperpanjang selama dua pekan dan akan dimulai pada Rabu (29/4/2020). "PSBB Bodebek akan diperpanjang 14 hari ke depan, mulai hari Rabu besok, sudah diputuskan," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2020).

Diagnoses Cause, Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi terjadi penurunan tren penyebaran dan menekan penularan Covid-19 Hal ini tercantum pada paragraf 3

Menurut Emil, selama dua pekan terakhir, terjadi penurunan tren penyebaran atau penularan Covid-19. Hal itu khususnya di tiga wilayah, yaitu Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok. Namun, kenaikan kasus masih terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Moral Judgement. Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) dianggap berhasil menekan persebaran Covid-19. Hal ini tersirat pada paragraf 5

"Jadi berita ini highlight-nya, PSBB Bodebek berhasil, khususnya di tiga wilayah. Artinya, PSBB dianggap baik dan berhasil menekan persebaran Covid-19," ujar Emil.

Treatment Recommendation. Untuk menindak lanjuti penanganan dan mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19 sehingga dapat menekan penularan Covid-19 dapat dilakukan hal yang sama dengan memperpanjang PSBB untuk wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang) seperti yang dilakukan untuk wilayah Bodebek (Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi) seperti yang tersirat di paragraf 6.

Selain itu, Emil mengatakan, Pemprov Jabar akan mengevaluasi PSBB di Bandung Raya yang baru sepekan berjalan. Menurut dia, status perpanjangan PSBB di Bandung Raya akan diputuskan pekan depan. "Hal yang sama akan kami evaluasi pada minggu depan untuk PSBB Bandung Raya," kata dia.

Tabel 3.8. Analisis Berita 8

Element	Kompas.com
<i>Define Problem</i>	Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) diperpanjang selama 14 hari mulai hari Rabu, 29 April 2020
<i>Diagnose Causes</i>	Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi terjadi penurunan tren penyebaran dan menekan penularan Covid-19
<i>Moral Judgement</i>	Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) dianggap berhasil menekan persebaran Covid-19.
<i>Treatment Recommendation</i>	Untuk menindak lanjuti penanganan dan mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19 sehingga dapat menekan penularan Covid-19 dapat dilakukan hal yang sama dengan memperpanjang PSBB untuk wilayah Bandung Raya

9. Berita : 9

Tanggal : 2 Mei 2020

Judul : Jawa Barat Terapkan PSBB pada 6-19 Mei 2020

INFO JABAR — Provinsi Jawa Barat akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku bagi semua kabupaten/kota mulai 6-19 Mei 2020. Hal itu seiring dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI yang mengabulkan permohonan Gubernur Jawa Barat atas aspirasi bupati/wali kota untuk PSBB level provinsi.

Bertepatan dengan Hari Buruh 1 Mei, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menandatangani SK bernomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Begitu menerima salinan SK, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung mengumumkan ke publik melalui Live IG sekitar pukul 21.00 WIB.

Dikutip dari keterangan resmi Humas Jabar, dalam SK Menteri tersebut, hanya disebutkan PSBB berlangsung untuk masa terpanjang inkubasi virus atau 14 hari. Namun Gubernur Ridwan Kamil mengumumkan bahwa PSBB Provinsi Jawa Barat akan dimulai Rabu (6/5/2020). Dihitung masa inkubasi virus terpanjang, maka PSBB Jabar akan berlangsung 6-19 Mei 2020.

Saat ini sudah ada 10 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB yakni di kawasan Bodebek (Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok) dan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang). PSBB Bodebek diketahui diperpanjang hingga 12 Mei, sementara PSBB Bandung Raya akan berakhir 5 Mei.

Dengan keputusan PSBB Jabar, dipastikan PSBB Bodebek dan Bandung Raya akan mengikuti masa terpanjang PSBB Provinsi Jawa Barat. “Sekarang sudah ada 10 kabupaten/kota yang sudah PSBB, 17 kabupaten kota lainnya akan menyusul PSBB,” ujar Gubernur Ridwan Kamil, Jumat, 1 April 2020 malam.

Menurut Emil, PSBB Jabar berada pada momen yang pas karena saat ini tren penularan sedang menurun sebagai dampak positif PSBB di berbagai kawasan seperti DKI Jakarta, Bodebek, Bandung Raya, serta kawasan lain di Pulau Jawa. Lompatan kasus akibat kasus positif impor (imported case) karena hilir mudik warga yang mudik dari zona merah saat ini sedang menurun. Ditambah semangat warga khususnya Jabar tren kedisiplinannya sedang bagus.

Emil menggambarkan, hari Rabu kemarin penambahan kasus positif di Jabar 50 orang dan sehari setelahnya atau Kamis penambahan kasus positif hanya tiga orang. “Hari ini, Jumat positif di Jabar adalah nol, tidak ada, zero,” ujar Emil.

Emil berharap semua pihak menyukseskan PSBB Provinsi untuk mempercepat penanganan Covid-19. “Kami berharap dengan PSBB Provinsi yang akan dimulai hari Rabu depan (6/5/20), maka warga Jabar bisa seirama, bisa satu gerakan, satu komando, penguncian wilayah, sehingga tren yang turun ini bisa kita maintain,” ucapnya.

Berdasarkan survei PSBB di Bodebek dan Bandung Raya, pergerakan manusia masih tercatat 50 persen. Sehingga pada PSBB Jabar, bupati/wali kota sudah satu visi dengan Gubernur untuk menargetkan pergerakan manusia hanya 30 persen.

Emil mengungkapkan, hingga kini di Jabar tidak ada kasus positif Covid-19 yang menjangkiti anak usia sekolah. Hal ini disebabkan anak - anak sekolah mematuhi kebijakan sekolah agar bersekolah di rumah dan selama itu tidak main ke mana - mana.

“Yang positif Covid-19 hampir tidak ditemukan di anak sekolah. Ini mengindikasikan anak sekolah adalah kelompok masyarakat paling disiplin, nurut ke orang tua dan guru. Kalau mau Covid-19 ini beres, tirulah kedisiplinan anak- anak sekolah,” ujar dia.

Gubernur menggarisbawahi, mobilitas kalangan milenial produktif terbilang masih tinggi padahal daerahnya sedang merapkan PSBB. Dari total kasus positif Covid-19 di Indonesia, 60 persennya menjangkiti kaum pria dengan rata-rata usia 50 tahun ke atas karena makin tinggi usia makin rendah imunitas.

“Dan para penular Covid-19 adalah lelaki milenial yang produktif. Jadi kepada para lelaki yang milenial, kalau mau Covid-19 ini beres, dapat bisnis lagi, hayuk kita repot sama- sama di PSBB Jabar,” kata Emil.

Gubernur optimistis PSBB Jabar akan membuahkan hasil positif. Menurut dia, kunci keberhasilan PSBB Jabar sekarang ada tiga, yakni disiplin, tes masif (RDT/PCR), dan pengayatan Ramadan.

“Kami meyakini ada hikmahnya di bulan Ramadan. Karena masyarakat lagi banyak di rumah untuk ibadah, imannya tinggi, rajin ibadah imunitas naik. Insyallah hal-hal

positif tadi bisa kita dapatkan. Di bulan Ramadan ini pemudik dilarang sehingga kami tidak mendapati kasus-kasus impor lagi,” ujar Emil. ()*

<https://nusantara.tempo.co/nusantara/204/jawa-barat-terapkan-psbb-pada-6-19-mei-2020>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020)

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku bagi semua kabupaten/kota mulai 6-19 Mei 2020 seperti yang disebutkan dalam paragraph ke 1

INFO JABAR — Provinsi Jawa Barat akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku bagi semua kabupaten/kota mulai 6-19 Mei 2020. Hal itu seiring dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI yang mengabulkan permohonan Gubernur Jawa Barat atas aspirasi bupati/wali kota untuk PSBB level provinsi.

Diagnoses Cause, Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB berlaku bagi semua kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI yang mengabulkan permohonan Gubernur Jawa Barat atas usulan dan aspirasi dari bupati dan walikota seperti yang tercantum pada berita di paragraf ke 1

Provinsi Jawa Barat akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku bagi semua kabupaten/kota mulai 6-19 Mei 2020. Hal itu seiring dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI yang mengabulkan permohonan Gubernur Jawa Barat atas aspirasi bupati/wali kota untuk PSBB level provinsi.

Usulan dari bupati/walikota di Jawa Barat ini dalam rangka memelihara trend an kecenderungan penularan Covid-19 yang sedang menurun seiring dengan keberhasilan PSBB di berbagai wilayah, seperti dikemukakan di paragraf ke 6

Menurut Emil, PSBB Jabar berada pada momen yang pas karena saat ini tren penularan sedang menurun sebagai dampak positif PSBB di berbagai kawasan seperti DKI Jakarta, Bodebek, Bandung Raya, serta kawasan lain di Pulau Jawa. Lompatan kasus akibat kasus positif impor (imported case) karena hilir mudik warga yang mudik dari zona merah saat ini sedang menurun. Ditambah semangat warga khususnya Jabar tren kedisiplinannya sedang bagus

Moral Judgement. Covid-19 dapat menular melalui kerumunan atau keramaian sehingga hampir tidak ditemukan anak sekolah yang terkena Covid-19. Hal ini disebabkan anak-anak sekolah mematuhi kebijakan sekolah agar bersekolah di rumah dan selama itu tidak main ke mana-mana. Hal ini disebutkan di paragraf 10 dan 11

Emil mengungkapkan, hingga kini di Jabar tidak ada kasus positif Covid-19 yang menjangkiti anak usia sekolah. Hal ini disebabkan anak-anak sekolah mematuhi kebijakan sekolah agar bersekolah di rumah dan selama itu tidak main ke mana-mana.

“Yang positif Covid-19 hampir tidak diketemukan di anak sekolah. Ini mengindikasikan anak sekolah adalah kelompok masyarakat paling disiplin, nurut ke orang tua dan guru. Kalau mau Covid-19 ini beres, tirulah kedisiplinan anak-anak sekolah,” ujar dia

Treatment Recommendation. Untuk menindak lanjuti penanganan dan mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19 prosentase pergerakan manusia perlu dikurangi seperti yang ditunjukkan pada paragraf 9

Berdasarkan survei PSBB di Bodebek dan Bandung Raya, pergerakan manusia masih tercatat 50 persen. Sehingga pada PSBB Jabar, bupati/wali kota sudah satu visi dengan Gubernur untuk menargetkan pergerakan manusia hanya 30 persen.

Demikian juga dengan mobilitas kaum muda produktif agar dapat dikurangi disebutkan di paragraph 12

Gubernur menggarisbawahi, mobilitas kalangan milenial produktif terbilang masih tinggi padahal daerahnya sedang merapkan PSBB. Dari total kasus positif Covid-19 di Indonesia, 60 persennya menjangkiti kaum pria dengan rata-rata usia 50 tahun ke atas karena makin tinggi usia makin rendah imunitas.

Tabel 3.9. Analisis Berita 9

Element	Tempo.co
<i>Define Problem</i>	Provinsi Jawa Barat akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku bagi semua kabupaten/kota mulai 6-19 Mei 2020
<i>Diagnose Causes</i>	Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB berlaku bagi semua kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI yang mengabulkan permohonan Gubernur Jawa Barat atas usulan dan aspirasi dari bupati dan walikota
<i>Moral Judgement</i>	Covid -19 dapat menular melalui kerumunan atau keramaian sehingga hampir tidak ditemukan anak sekolah yang terkena Covid-19. Hal ini disebabkan anak - anak sekolah mematuhi kebijakan sekolah agar bersekolah di rumah dan selama itu tidak main ke mana – mana.
<i>Treatment Recommendation</i>	Untuk menindak lanjuti penanganan dan mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19 prosentase pergerakan manusia perlu dikurangi

10. Berita : 10

Tanggal : 2 Mei 2020

Judul : Penjelasan Lengkap Ridwan Kamil soal PSBB Jabar Mulai 6 Mei 2020

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pembatasan sosial berskala besar untuk tingkat provinsi akan dimulai pada 6 Mei 2020. Sebelumnya, PSBB telah diterapkan di zona metropolitan Bodebek pada 15 April dan metropolitan Bandung Raya pada 22 April lalu.

Menurut Emil, sapaan akrabnya, kurva penyebaran Covid-19 di Jabar relatif landai setidaknya dalam tiga pekan terakhir.

"Kesimpulannya, didapati bahwa kurva penyebaran Covid-19 sudah mulai melandai di Jawa Barat. Rata-rata maksimal di angka 40 kasus (per hari)," tutur Emil dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (2/5/2020).

"Bahkan dua hari lalu di hari Kamis itu penambahan hanya tiga kasus, kemudian di hari Jumat kemarin nol kasus. Mungkin kemarin hari yang istimewa dan mudah-mudahan kita berdoa tren menurun ini bisa kita jaga dengan baik."

Menurut dia, tren penurunan kasus ini turut disebabkan penerapan PSBB serta larangan mudik. Meski demikian, kata Emil, pergerakan warga selama PSBB masih di angka 50 persen.

"Walaupun idealnya menurut teori kita sedang menuju 30 persen. Jadi kalau PSBB di Jawa Barat ini bisa menjaga pergerakan hanya sampai 30 persen maka itu lebih efektif," ungkapnya.

Alasan itu yang mendasari PSBB Jabar. Ia pun secara resmi mengumumkan bahwa 17 kota atau kabupaten di Jawa Barat akan melaksanakan PSBB secara serentak mulai 6 Mei 2020.

"Jadi di hari Rabu pekan depan maka seluruh Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan PSBB. Mungkin ini pertama di Indonesia, 27 daerah pintunya akan dibatasi, pergerakan akan dibatasi berbarengan dengan momentum pelarangan mudik," ujarnya.

Emil berharap PSBB Jabar dapat menekan jumlah kasus penyebaran di Jabar yang saat ini hanya berasal dari dua sumber, yakni imported case dan infeksi lokal.

"Imported case itu mayoritas datang dari orang-orang yang hilir mudik dan mudik dari daerah zona merah ke kampung halaman di Jawa Barat. Jadi kombinasi PSBB di Jawa Barat dikombinasikan dengan larangan mudik, dikombinasikan dengan pengetesan massal, ini yang membuat berita penambahan positif makin menurun, alhamdulillah," jelasnya.

<https://bandung.kompas.com/read/2020/05/02/13592011/penjelasan-lengkap-ridwan-kamil-soal-psbb-jabar-mulai-6-mei-2020>, diakses pada 10 Oktober 2020)

Define Problem, dalam berita ini kasus yang di utamakan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk tingkat provinsi Jawa Barat akan dimulai pada 6 Mei 2020 seperti yang disebutkan dalam paragraf ke 1

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pembatasan sosial berskala besar untuk tingkat provinsi akan dimulai pada 6 Mei 2020. Sebelumnya, PSBB telah diterapkan di zona metropolitan Bodebek pada 15 April dan metropolitan Bandung Raya pada 22 April lalu.

Define Problem, dalam berita ini kasus yang di utamakan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk tingkat provinsi Jawa Barat akan dimulai pada 6 Mei 2020 seperti yang disebutkan dalam paragraf ke 1

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pembatasan sosial berskala besar untuk tingkat provinsi akan dimulai pada 6 Mei 2020. Sebelumnya, PSBB telah diterapkan di zona metropolitan Bodebek pada 15 April dan metropolitan Bandung Raya pada 22 April lalu.

Diagnoses Cause, Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB berlaku bagi semua kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat setelah melihat kurva penyebaran Covid-19 di Jabar relatif landai setidaknya dalam tiga pekan terakhir dan pergerakan warga masih di angka 50 persen. Hal ini tercantum pada paragraf 2 dan 4

Menurut Emil, sapaan akrabnya, kurva penyebaran Covid-19 di Jabar relatif landai setidaknya dalam tiga pekan terakhir. "Kesimpulannya, didapati bahwa kurva penyebaran Covid-19 sudah mulai melandai di Jawa Barat. Rata-rata maksimal di angka 40 kasus (per hari)," tutur Emil dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (2/5/2020).

Menurut dia, tren penurunan kasus ini turut disebabkan penerapan PSBB serta larangan mudik. Meski demikian, kata Emil, pergerakan warga selama PSBB masih di angka 50 persen. "Walaupun idealnya menurut teori kita sedang menuju 30 persen.

Jadi kalau PSBB di Jawa Barat ini bisa menjaga pergerakan hanya sampai 30 persen maka itu lebih efektif," ungkapnya

Moral Judgement. Covid -19 dapat menular melalui transmisi lokal ataupun antar daerah sehingga dilakukan penyekatan dan juga larangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Hal ini tersirat pada paragraf 6

"Jadi di hari Rabu pekan depan maka seluruh Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan PSBB. Mungkin ini pertama di Indonesia, 27 daerah pintunya akan dibatasi, pergerakan akan dibatasi berbarengan dengan momentum pelarangan mudik," ujarnya.

Treatment Recommendation. Untuk menindak lanjuti penanganan dan mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19 sehingga tidak meningkatkan prosentase pergerakan manusia maka perlu ada PSBB di Jawa Barat dan larangan mudik untuk mencegah transmisi Covid-19 antar daerah seperti yang ditunjukkan pada paragraf 8.

"Imported case itu mayoritas datang dari orang-orang yang hilir mudik dan mudik dari daerah zona merah ke kampung halaman di Jawa Barat. Jadi kombinasi PSBB di Jawa Barat dikombinasikan dengan larangan mudik, dikombinasikan dengan pengetesan massal, ini yang membuat berita penambahan positif makin menurun, alhamdulillah," jelasnya.

Tabel 3.10. Analisis Berita 10

Element	Kompas.com
<i>Define Problem</i>	Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk tingkat provinsi Jawa Barat akan dimulai pada 6 Mei 2020
<i>Diagnose Causes</i>	Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB berlaku bagi semua kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat setelah melihat kurva penyebaran Covid-19 di Jabar relatif landai setidaknya dalam tiga pekan terakhir dan pergerakan warga masih di angka 50 persen.

<i>Moral Judgement</i>	Covid -19 dapat menular melalui transmisi lokal ataupun antar daerah sehingga dilakukan penyekatan dan juga larangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas.
<i>Treatment Recommendation</i>	Untuk menindak lanjuti penanganan dan mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19 sehingga tidak meningkatkan prosentase pergerakan manusia maka perlu ada PSBB di Jawa Barat dan larangan mudik untuk mencegah transmisi Covid-19 antar daerah

11. Berita : 11

Tanggal : 21 Mei 2020

Judul : PSBB Tingkat Provinsi Jabar Dilanjutkan Hingga 29 Mei

INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi di Jabar dilanjutkan secara proporsional sampai Jumat, 29 Mei 2020. Artinya, setiap daerah mendapat diskresi untuk menentukan persentase maksimal pergerakan masyarakat selama PSBB berlangsung.

"Kami juga mendapati kerawanan euforia dari Idul Fitri, maka kami sepakat Gugus Tugas untuk melanjutkan PSBB provinsi sampai tanggal 29 Mei 2020," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu, 20 Mei 2020.

Dikutip dari keterangan resmi Humas Jabar, hasil evaluasi PSBB tingkat provinsi di Jabar memperlihatkan tren penularan Covid-19 menurun. Hal itu terlihat dari rata-rata penambahan kasus per hari, dari 40 kasus per hari pada akhir April 2020 turun menjadi 21 kasus per hari setelah PSBB provinsi diterapkan.

Tingkat rata-rata kematian Jabar akibat Covid-19 pun menurun dari tujuh jiwa menjadi empat jiwa per hari. Sementara tingkat kesembuhan mencapai dua kali lipat. Kemudian, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit mengalami penurunan, dari sekitar 430 pasien menurun menjadi sekitar 270 pasien.

PSBB tingkat provinsi di Jabar juga berhasil menekan mobilitas warga. Hal itu berdampak pada penurunan kasus baru. Sebelum PSBB tingkat provinsi berlaku, reproduksi penularan Covid-19 mencapai indeks 3 di Jabar. Kini, indeks tersebut menurun menjadi 1.

"Menjelang Idul Fitri, terjadi kenaikan lalu lintas dari 20-30 persen selama PSBB, di minggu ini naik ke 40 persen, berdasarkan catatan kami. Ini mengindikasikan banyak warga yang tidak bisa menahan diri keluar rumah, dan rata-rata untuk berbelanja," kata Emil.

Diakui dia, hal tersebut memang tidak bisa ditahan, dan kerumunan pun tidak bisa ditahan. "Kami khawatir indeks angka 1 sebagai prestasi ini bisa bergeser di atas satu karena ada kasus-kasus baru di kerumunan menjelang Lebaran," ucapnya.

Emil menyatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar memutuskan untuk memperketat pengawasan di sejumlah titik menjelang Idulfitri, yang mana pergerakan warga berpotensi meningkat. "TNI/Polri akan terus meningkatkan dan menggandakan keamanan," katanya.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, mengatakan pihaknya akan menguatkan keamanan di titik penyekatan.

"Kita akan memperketat check point untuk mencegah orang mudik, dan lain lain. Sehingga, apa yang kita lakukan selama PSBB bisa terjaga, dan apa yang diharapkan kita semua tidak terjadi peningkatan penularan," kata Nugroho.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jabar Rudy Sufahriadi menyatakan bahwa Polda Jabar akan gencar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk berada di rumah apabila tidak memiliki kepentingan.

"Kami akan berupaya sosialisasi di tiap kabupaten/kota. Masing- masing Kapolres, Kasatlantas menyosialisasikan agar warga tidak keluar rumah. Jangan sampai grafik yang sudah baik jadi berubah," ucap Rudy. ()*

<https://nusantara.tempo.co/nusantara/240/psbb-tingkat-provinsi-jabar-dilanjutkan-hingga-29-mei>, diakses tanggal 10 Oktober 2020)

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi di Jabar dilanjutkan secara proporsional sampai Jumat, 29 Mei 2020 seperti yang disebutkan dalam paragraph ke 1

INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi di Jabar dilanjutkan secara proporsional sampai Jumat, 29 Mei 2020. Artinya, setiap daerah mendapat diskresi untuk menentukan persentase maksimal pergerakan masyarakat selama PSBB berlangsung.

Diagnoses Cause, Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB berlaku bagi semua kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PSBB tingkat provinsi di Jabar memperlihatkan tren penularan Covid-19 menurun. Hal itu terlihat dari rata-rata penambahan kasus per hari, dari 40 kasus per hari pada akhir April 2020 turun menjadi 21 kasus per hari setelah PSBB provinsi diterapkan. Selain itu Tingkat rata-rata kematian Jabar akibat Covid-19 pun menurun dari tujuh jiwa menjadi empat jiwa per hari. Sementara tingkat kesembuhan mencapai dua kali lipat. Kemudian, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit mengalami penurunan, dari sekitar 430 pasien menurun menjadi sekitar 270 pasien. PSBB tingkat provinsi di Jabar juga berhasil menekan mobilitas warga. Hal itu berdampak pada penurunan kasus baru. Sebelum PSBB tingkat provinsi berlaku, reproduksi penularan Covid-19 mencapai indeks 3 di Jabar. Kini, indeks tersebut menurun menjadi 1.

Terjadi kenaikan lalu lintas dari 20-30 persen selama PSBB menjelang Idul Fitri. Hal ini tercantum pada paragraph 3, 4, 5 dan 6

Dikutip dari keterangan resmi Humas Jabar, hasil evaluasi PSBB tingkat provinsi di Jabar memperlihatkan tren penularan Covid-19 menurun. Hal itu terlihat dari rata-rata penambahan kasus per hari, dari 40 kasus per hari pada akhir April 2020 turun menjadi 21 kasus per hari setelah PSBB provinsi diterapkan.

Tingkat rata-rata kematian Jabar akibat Covid-19 pun menurun dari tujuh jiwa menjadi empat jiwa per hari. Sementara tingkat kesembuhan mencapai dua kali lipat. Kemudian, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit mengalami penurunan, dari sekitar 430 pasien menurun menjadi sekitar 270 pasien.

PSBB tingkat provinsi di Jabar juga berhasil menekan mobilitas warga. Hal itu berdampak pada penurunan kasus baru. Sebelum PSBB tingkat provinsi berlaku, reproduksi penularan Covid-19 mencapai indeks 3 di Jabar. Kini, indeks tersebut menurun menjadi 1.

"Menjelang Idul Fitri, terjadi kenaikan lalu lintas dari 20-30 persen selama PSBB, di minggu ini naik ke 40 persen, berdasarkan catatan kami. Ini mengindikasikan banyak warga yang tidak bisa menahan diri keluar rumah, dan rata-rata untuk berbelanja," kata Emil.

Moral Judgement. Covid -19 dapat menular melalui kerumunan atau keramaian dan juga transmisi local ataupun antar daerah sehingga dilakukan penyekatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Hal ini tersirat pada paragraf 8 dan 9

Emil menyatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar memutuskan untuk memperketat pengawasan di sejumlah titik menjelang Idulfitri, yang mana pergerakan warga berpotensi meningkat. "TNI/Polri akan terus meningkatkan dan menggandakan keamanan," katanya.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, mengatakan pihaknya akan menguatkan keamanan di titik penyekatan.

"Kita akan memperketat check point untuk mencegah orang mudik, dan lain lain. Sehingga, apa yang kita lakukan selama PSBB bisa terjaga, dan apa yang diharapkan kita semua tidak terjadi peningkatan penularan," kata Nugroho

Treatment Recommendation. Untuk menindak lanjuti penanganan dan mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19 sehingga tidak meningkatkan prosentase pergerakan manusia maka dirasakan perlu mengadakan sosialisasi untuk tidak melakukan bepergian bila

tidak dirasa perlu atau mendesak dan timbul dari kesadaran diri masing-masing warga seperti yang ditunjukkan pada paragraf 10

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jabar Rudy Sufahriadi menyatakan bahwa Polda Jabar akan gencar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk berada di rumah apabila tidak memiliki kepentingan.

"Kami akan berupaya sosialisasi di tiap kabupaten/kota. Masing- masing Kapolres, Kasatlantas menyosialisasikan agar warga tidak keluar rumah. Jangan sampai grafik yang sudah baik jadi berubah," ucap Rudy.

Tabel 3.11. Analisis Berita 11

Element	Tempo.co
<i>Define Problem</i>	Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi di Jabar dilanjutkan secara proporsional sampai Jumat, 29 Mei 2020
<i>Diagnose Causes</i>	Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB berlaku bagi semua kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PSBB tingkat provinsi di Jabar memperlihatkan tren penularan Covid-19 menurun, Tingkat rata-rata kematian Jabar akibat Covid-19 pun menurun, tingkat kesembuhan mencapai dua kali lipat. jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit mengalami penurunan, mobilitas warga berhasil ditekan dan berdampak pada penurunan kasus baru.
<i>Moral Judgement</i>	Covid-19 dapat menular melalui kerumunan atau keramaian dan juga transmisi lokal ataupun antar daerah sehingga dilakukan penyekatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas.
<i>Treatment Recommendation</i>	Untuk menindak lanjuti penanganan dan mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19 sehingga tidak meningkatkan prosentase pergerakan manusia maka dirasakan perlu mengadakan sosialisasi untuk tidak melakukan bepergian bila tidak dirasa perlu.

12. Berita : 12
Tanggal : 20 Mei 2020
Judul : Ridwan Kamil Antisipasi Euforia Idul Fitri di Tengah Pandemi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewaspadaai euforia hari Raya Idul Fitri yang memicu pergerakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Karena itu, ia tetap mengingatkan kepada jajaran Polri dan TNI untuk tetap berjaga menyekat kerumunan.

Pemprov Jabar sendiri telah mengeluarkan daftar level kewaspadaan bagi 27 kota kabupaten di Jabar hingga tingkat kelurahan.

Meskipun ada wilayah di zona aman, ia meminta agar petugas memperketat pengawasan jangan sampai warga di wilayah rawan masuk ke daerah aman.

"Kami juga mendapati kerawanan euforia dari Idul Fitri, maka kami sepakat Gugus Tugas melanjutkan PSBB provinsi sampai 29 Mei 2020 tapi bentuknya psbb proporsional. Penjagaan di kelurahan dan desa yang berbeda warna akan disosialisasikan anggota TNI dan Polri. Jangan sampai desa yang status hijau didatangi warga dari status merah atau hitam," ungkap Emil dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (20/5/2020).

Emil pun menegaskan tak ada relaksasi PSBB di Jabar. Hanya saja ketegasan petugas akan dilakukan secara proporsional bergantung level kewaspadaan tiap daerah.

"Kita tidak berharap ada gelombang kedua. Saya katakan tidak ada relaksasi dari PSBB ini, tetap ketat, kita memberikan data apa adanya, tapi memberikan treatment kedisiplinan sesuai dengan proporsinya. Jadi ada yang tetap tegas disiplin tapi proporsi yang disesuaikan," tutur Emil.

Dari pengamatannya, menjelang Idul Fitri terjadi kenaikan pergerakan lalu lintas hingga 40 persen.

Ini mengindikasikan, lanjut Emil, warga tak bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah. Padahal menurutnya, PSBB efektif menekan laju penularan Covid-19 di Jabar.

"Rata-rata berbelanja, kalau ini tidak bisa ditahan, kerumunan juga tidak bisa ditahan kami khawatir karena ada kasus baru di kerumunan menjelang lebaran. Ini menjadi atensi, oleh karena itu, TNI Polri akan terus meningkatkan menduakalilipatkan pasukan," tuturnya.

Aktivitas warga meningkat

Terkait adanya kenaikan aktivitas di pasar tradisional dan moderen, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Arifin Soedjayana akan mengetatkan kembali protokol kesehatan Covid-19 untuk mencegah penularan baru virus corona tersebut di pusat perniagaan.

"Protokol kesehatan untuk di pasar tradisional dan juga di pasar modern, dari sejak awal kita sudah melayangkan surat kepada para pelaku perdagangan ini untuk mereka melakukan protokol penanganan Covid-19. Kita malah lebih dulu dari kementerian soal ini," kata Arifin.

Ia pun sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dab Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) maupun juga Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) untuk tetap mengingatkan para pelaku usaha dan masyarakat.

"Contoh lain, di Kota Bandung sudah mau melakukan relaksasi terkait perdagangan ini, per tanggal 22 Mei mall mau dibuka. Tapi itu kemudian dirapatkan oleh gugus tugas Kota Bandung dan mereka menyimpulkan tidak akan dibuka, jadi sampai dengan perpanjangan tanggal 29 Mei," katanya.

Aturan pun tetap diberlakukan, untuk pasar modern masih tetap beroperasi jam 08.00 sampai dengan jam 20.00 di kawasan perkotaan, dan kawasan lainnya sampai jam 18.00. Hal tersebut disesuaikan gugus tugas di daerah masing-masing.

<https://regional.kompas.com/read/2020/05/20/17381441/ridwan-kamil-antisipasi-euforia-idul-fitri-di-tengah-pandemi?page=all>, diakses pada 10 Oktober 2020)

Define Problem, dalam berita ini. Kasus yang di utamakan adalah Gugus Tugas melanjutkan PSBB proporsional tingkat provinsi sampai 29 Mei 2020 seperti yang disebutkan dalam paragraf ke 2

Meskipun ada wilayah di zona aman, ia meminta agar petugas memperketat pengawasan jangan sampai warga di wilayah rawan masuk ke daerah aman. "Kami juga mendapati kerawanan euforia dari Idul Fitri, maka kami sepakat Gugus Tugas melanjutkan PSBB provinsi sampai 29 Mei 2020 tapi bentuknya psbb proporsional.

Diagnoses Cause, Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB berlaku bagi semua kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PSBB tingkat provinsi di Jabar memperlihatkan terjadi kenaikan pergerakan lalu lintas hingga 40 persen selama PSBB menjelang Idul Fitri mengindikasikan warga untuk tidak dapat menahan diri ke luar rumah. Hal ini tercantum pada paragraf 3

Dari pengamatannya, menjelang Idul Fitri terjadi kenaikan pergerakan lalu lintas hingga 40 persen. Ini mengindikasikan, lanjut Emil, warga tak bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah. Padahal menurutnya, PSBB efektif menekan laju penularan Covid-19 di Jabar.

Moral Judgement. Covid -19 dapat menular melalui kerumunan atau keramaian dan juga transmisi lokal ataupun antar daerah sehingga dilakukan penyekatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Hal ini tersirat pada paragraf 3

Dari pengamatannya, menjelang Idul Fitri terjadi kenaikan pergerakan lalu lintas hingga 40 persen. Ini mengindikasikan, lanjut Emil, warga tak bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah. Padahal menurutnya, PSBB efektif menekan laju penularan Covid-19 di Jabar. "Rata-rata berbelanja, kalau ini tidak bisa ditahan, kerumunan juga tidak bisa ditahan kami khawatir karena ada kasus baru di kerumunan menjelang lebaran. Ini menjadi atensi, oleh karena itu, TNI Polri akan terus meningkatkan menduakalilipatkan pasukan," tuturnya

Treatment Recommendation. Untuk menindak lanjuti penanganan dan mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19 sehingga tidak meningkatkan prosentase pergerakan

manusia maka perlu diadakan sosialisasi oleh TNI/Polri untuk meningkatkan penjagaan di kelurahan dan desa mencegah transmisi Covid-19 antar daerah seperti yang ditunjukkan pada paragraf 3.

Penjagaan di kelurahan dan desa yang berbeda warna akan disosialisasikan anggota TNI dan Polri. Jangan sampai desa yang status hijau didatangi warga dari status merah atau hitam," ungkap Emil dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (20/5/2020).

Juga memberikan treatment kedisiplinan proporsional sesuai dengan level kewaspadaan seperti disebutkan di paragraf 2

Emil pun menegaskan tak ada relaksasi PSBB di Jabar. Hanya saja ketegasan petugas akan dilakukan secara proporsional bergantung level kewaspadaan tiap daerah. "Kita tidak berharap ada gelombang kedua. Saya katakan tidak ada relaksasi dari PSBB ini, tetap ketat, kita memberikan data apa adanya, tapi memberikan treatment kedisiplinan sesuai dengan proporsinya. Jadi ada yang tetap tegas disiplin tapi proporsi yang disesuaikan," tutur Emil.

Tabel 3.12. Analisis Berita 12

Element	Kompas.com
<i>Define Problem</i>	Gugus Tugas melanjutkan PSBB proporsional tingkat provinsi sampai 29 Mei 2020
<i>Diagnose Causes</i>	Pemerintah Daerah Jawa Barat memutuskan PSBB berlaku bagi semua kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PSBB tingkat provinsi di Jabar memperlihatkan terjadi kenaikan pergerakan lalu lintas hingga 40 persen
<i>Moral Judgement</i>	Dilakukan penyekatan dengan menggandakan jumlah pasukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas.
<i>Treatment Recommendation</i>	Sosialisasi oleh TNI/Polri untuk meningkatkan penjagaan di kelurahan dan desa mencegah transmisi Covid-19 antar daerah.

B. Pembahasan

Perbandingan Analisis berita yang sama mengenai persetujuan Kementerian Kesehatan tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi

Berita No. 1 di muat di media online Tempo.co pada hari Sabtu, 11 April 2020 dengan judul : “Breaking News: Pemerintah Setujui Status PBB untuk Jawa Barat” sedangkan Berita 2 dimuat pada harian Kompas.com juga pada hari yang sama diberi judul : “Kemenkes Setujui PSBB Depok, Bogor, dan Bekasi”

Tabel 3.13. Perbandingan Analisis Berita 1 dan 2

Element	Tempo.co	Kompas.com
<i>Define Problem</i>	Kementerian Kesehatan sudah menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa wilayah di Jawa Barat	Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat.
<i>Diagnose Causes</i>	Proposal pengajuan PSBB diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Gubernur Ridwan Kamil pada 8 April 2020	Permintaan dari Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil telah meminta persetujuan untuk penerapan PSBB kepada Kemenkes
<i>Moral Judgement</i>	Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB, Jawa Barat sudah memenuhi kriteria daerah yang dapat mengajukan status PSBB.	PSBB telah diajukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Kemenkes, untuk lima daerah di Jawa Barat itu akan satu zonasi dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran Covid-19.

<i>Treatment Recommendation</i>	Kepala Daerah yang mengajukan status PSBB harus menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.	Untuk menjalankan PSBB, Pemerintah Tanggerang Selatan telah menganggarkan 100 miliar untuk penanganan Covid-19 mulai dari kesehatan, keamanan dan distribusi barang
---------------------------------	--	---

Tampak dalam Tabel 3.13 untuk berita yang sama dan dimuat pada tanggal yang sama antara media online Tempo.co dan Kompas.com secara umum dianalisis dengan Elemen Framing Entman memberikan hasil yang sama meskipun redaksi kalimat nya sedikit berbeda.

Define problems baik pada Tempo.co dan Kompas.co adalah persetujuan Kemenkes penerapan PSBB di beberapa wilayah Jawa Barat

Diagnose causes kenapa PSBB disetujui Kemenkes adalah karena pengajuan proposal dari Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat

Make moral judgement pada Tempo.co adalah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB, Jawa Barat sudah memenuhi kriteria daerah yang dapat mengajukan status PSBB, sedangkan pada Kompas.com lima daerah di Jawa Barat itu akan satu zonasi dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran Covid-19.

Pasal 2 Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB menyatakan :

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain

Treatment recommendation pada Tempo.co dan Kompas.com sesuai dengan ayat (5)

Pasal 4 Permenkes No.9 Tahun 2020:

Gubernur/Bupati/Walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian terhadap pemberitaan “Bagaimana framing pemberitaan mengenai PSBB oleh Gubernur Jawa Barat” antara media Tempo.co dan Kompas.com, peneliti menyimpulkan bahwa, keempat aspek pada teori Robert N. Entman yang penulis gunakan sebagai pedoman penelitian dapat dilaksanakan dengan baik oleh Tempo.co ataupun Kompas.com sesuai dengan kaidahnya. Kemudian dari keseluruhan pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media tersebut tidak ditemukan perbedaan yang signifikan di antara masing-masing media. Baik Tempo.co ataupun Kompas.com memperoleh sumber pemberitaan mengenai PSBB oleh Gubernur Jawa Barat melalui Konferensi Pers, dan menuliskan hal yang sama meskipun dengan redaksi kalimat yang berbeda-beda. Namun dalam rangka memperoleh informasi lebih lengkap dan mendalam ternyata Tempo.co melakukan wawancara eksklusif dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat dan memuatnya di Majalah Tempo.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan objek penelitian. Penulis hanya meneliti dan menganalisis pemberitaan “Bagaimana framing pemberitaan mengenai PSBB oleh Gubernur Jawa Barat” pada media *online* Tempo.co dan Kompas.com, sedangkan masih banyak media *online* lainnya yang memberitakan kasus tersebut.
2. Objek penelitian hanya berita tekstual. Jauh lengkap data hasil penelitiannya jika melakukan wawancara dengan wartawan penulis berita tersebut.

C. Saran

1. Akademis
 - a. Objek media online yang diteliti lebih banyak akan menunjukkan keberagaman *framing* oleh wartawan penulis berita dan memperluas pandangan mahasiswa peneliti

- b. Untuk lebih lengkap dan lebih menyeluruh hasil penelitian sebaiknya data berita tekstual media *online* yang diteliti juga semakin lebih banyak

2. Praktis

Wawancara terhadap lebih banyak nara sumber baik dari Kepala Daerah, instansi atau lembaga dan warga masyarakat yang terkena dampak dari suatu Penetapan Peraturan akan membuat pemberitaan lebih menyeluruh dan seimbang.



DAFTAR PUSTAKA

- Alexa.com. (2020). <https://www.alexacom/topsites/countries/ID> ; Diakses 23 Juni 2020 : 11.45
- Anggara, S. , Afiyah, S. , Farida, A.S. & Muslim, J. (2020). *Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Jawa Barat* . Bandung . Universitas Islam Negeri Bandung
- Antara TV Indonesia. 2020. *Dampak yang ditimbulkan PSBB di Seluruh Wilayah Indonesia*. <https://idcloudhost.com/menelusuri-dampak-yang-ditimbulkan-psbb-di-seluruh-wilayah-indonesia/> 5 Agustus 2020 (14:00)
- Dwirahmadi, Febi. 2020. Dua sisi karantina wilayah mandiri warga dalam mencegah penyebaran COVID-19. <https://theconversation.com/dua-sisi-karantina-wilayah-mandiri-warga-dalam-mencegah-penyebaran-covid-19-135689> - 5 Agustus 2020 (15:30)
- Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS
- _____. (2012). *“Analisis Framing” Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, cetakan IV. Yogyakarta: LKiS.
- Erwin, Erwin & Susanto, Eko. (2019). Pembingkai Berita Politik di Media Online (*Analisis Framing Pemberitaan Pidato Jokowi Pada Rapat Umum Relawan 4 Agustus 2018 di Mediaindonesia.Com, Tribunnews.Com dan Okezone.Com*). Koneksi Vol. 2, No. 2, Desember 2018, Hal 315-320
- Handariastuti, R., Achmad, Z.A. & Bramayudha, A. (2020). Analisis Framing Berita Pemberhentian PSBB Surabaya Raya Di Media Online *Kompas.Com Dan Suarasurabaya.Net*. Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Huda, Nurul (2019). *Analisis Framing Model Robert N Entman Tentang Pemberitaan Hoax Ratna Sarumpaet di Detik.com Rentang Waktu 03-31 Oktober 2018*. Skripsi pada UIN Sunan Ampel Surabaya
- Juditha, C. (2013). *Akurasi Berita dalam Jurnalisme Online (Kasus Dugaan Korupsi Mahkamah Konstitusi di Portal Berita Detiknews*. Jurnal Pekommas. Vol. 16. No. 3. Desember 2013:145-154

- Kautsar, Nurul Diva. 2020. *Ridwan Kamil: Paparan Virus Corona Terjadi di Daerah Penyangga Ibu Kota*. <https://www.merdeka.com/jabar/berikut-ini-daftar-wilayah-dengan-dugaan-penyebaran-corona-tertinggi-di-jawa-barat.html> - 5 Agustus 2020 (16:10)
- Kompas.com (2019) <https://inside.kompas.com/about-us> . 6 Agustus 2020 (14.00)
- Kompas.com. (2020) . <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/27/092529123>, n.d.
- Maulana, Yuha – detikNews . Rabu, 08 Jul 2020 10:56 WIB. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5084553/jejak-ridwan-kamil-tangani-covid-19-di-jawa-barat> . 5 Agustus 2020 (17:00)
- Novianti, Evi., Nugraha, A.R. & Sjoraido, D.F. (2020). *Strategi Komunikasi Humas Jawa Barat Pada Masa Pandemi Covid19*. Bandung. Universitas Padjadjaran
- Oktavian, Suryo. (2019). *Analisis Framing Pada Pemberitaan di Detik.com dan Tempo.co pada periode Maret 2018*. Skripsi pada Universitas Islam Indonesia
- Oktaviani, Rika (2020) Analisis Framing Pemberitaan Penularan Covid-19 Di Media Online *Jurnal Ilmu Komunikasi* . Vol. 10, No. 2, October 2020
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. 3 April 2020. Jakarta
- Pikobar. (2020). <https://pikobar.jabarprov.go.id/> Diakses 30 April 2020;07.13
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai. Pustaka. Hal 61
- Romli A, S. M. (2012). *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Romli, A. S. M. (2014). *Jurnalistik Online -- Pengertian, Definisi, dan Karakteristik. Komunikasi UIN Bandung. Program Studi Jurnalistik dan Humas. Dilihat 2 Agustus 2020*. <http://komunikasi.uinsgd.ac.id/jurnalistik-online-istilah-definisi-dan-karakteristik/>
- Sari, Desy Nia. 2020. *Efek Samping PSBB Terhadap Masyarakat*. <https://yoursay.suara.com/news/2020/04/16/171009/efek-samping-psbb-terhadap-masyarakat?page=all> . 5 Agustus 2020 (13:20)

Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, Analisis Framing*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137

Tempo.co (2019). <https://www.tempo.id/corporate.php> - 6 Agustus 2020 (15:00)

Tirto.id . (2020). <https://tirto.id> › Kesehatan. Diakses 30 April 2020;10:00

